



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI DENGAN MENTERI BUMN RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 10 (Sepuluh)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 14 September 2023
Waktu : Pukul 10.30 s.d 12.46 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt.1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PDIP)
Acara : Pembahasan terkait:
1. Penyesuaian RKA/KL Tahun Anggaran 2024 (Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran)
2. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.
(Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
35 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F- PDIP)**
9 dari 12 orang Anggota
 1. Aria Bima
 2. Adisatrya Suryo Sulisto
 3. Prof. Assc. Dr. Darmadi Durianto, S.E., M.B.A.
 4. ST. Ananta Wahana, S.H.
 5. Sonnu T. Damaparamita
 6. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
 7. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
 8. dr. H. Mufti A. N. Anam
 9. Dr. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.
 - 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F- PG)**
5 dari 7 orang Anggota
 1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
 2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
 3. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
 4. Trifena M. Tinal, B.Sc.
 5. Nusron Wahid

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F- P. GERINDRA)

7 dari 8 orang Anggota

1. Mohammad Hekal, M.B.A.
2. Andre Rosiade
3. Khilmi
4. Ir. H. La Tinro La Tunrung
5. M. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., MBA.
6. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.
7. Mulan Jameela

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F- P. NASDEM)

3 dari 6 orang Anggota

1. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
2. M. Syamsul Luthfi, S.E.
3. H. Subardi, S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F- PKB)

4 dari 6 orang Anggota

1. Faisol Riza, S.S.
2. Ir. H.M. Nasim Khan
3. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.
4. H. Ali Ahmad

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F- PD)

3 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
2. Muslim SHI., M.M.
3. Hj. Melani Leimena Suharli

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F- PKS)

1 dari 4 orang Anggota

1. Amin AK, M.M.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F- PAN)

3 dari 4 orang Anggota

1. Dr. H. Jon Erizal, S.E., MBA.
2. Abdul Hakim Bafagih
3. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F- PPP)

0 dari 2 orang Anggota

-

B. UNDANGAN/PEMERINTAH:

Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (Dr. H. Erick Thohir, B.A., M.B.A.) beserta jajarannya.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Masa Sidang I sidang Tahun Sidang 2023-2024, Kamis, 14 September 2023.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,
Syalom,
Om swastiastu,
Nammo buddhaya,
Salam kebajikan,

Yang terhormat Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi VI DPR RI,
Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir beserta seluruh jajarannya,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN pada hari ini tentunya dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai hasil keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Bamus pada tanggal 18 Januari 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Paripurna Pasca Pencabutan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terkait dengan Pandemi Covid-19 oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2022, maka rapat-rapat yang dilakukan Alat Kelengkapan Dewan dan mitra kerja dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah seperti kita laksanakan kemarin-kemarin, seperti halnya terkait dengan waktu penyelenggaraan, lama pelaksanaan rapat-rapat dapat menyesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan, dan peliputan pelaksanaan rapat Komisi VI dilakukan *live streaming* oleh TV Parlemen, media cetak, dan media elektronik lainnya mendapatkan sumber berita dari TV Parlemen.

Bapak-Ibu, dan hadirin yang kami muliakan,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI, Pak Ketua, selamat datang, rapat kerja hari ini telah dihadiri dan ditandatangani dari 14, 15 orang, izin 2, terdiri dari 8 fraksi. Dengan demikian kuorum untuk membuka acara ini rapat pada hari ini telah bisa terpenuhi. Rapat akan saya buka dan terbuka untuk umum, dapat kita setuju ya?

(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Kami juga ingin mendapatkan persetujuan, apakah rapat hari ini bisa kita akhiri pada pukul 12?

(KETUK PALU 1 KALI)

Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri BUMN, atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja pada hari ini. Sesuai undangan yang telah kami sampaikan bahwa rapat pada hari ini untuk membahas mengenai penyesuaian RKA K/L tahun anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran. Dan kalau masih ada hal yang lain-lain, kita agendakan pada agenda kedua, setelah ada keputusan RKA K/L.

Bapak-Ibu, dan hadirin yang saya muliakan,

Pada tanggal 30 Agustus, 2023 Komisi VI telah menerima dan menyetujui penjelasan dari Menteri BUMN berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.02/2023. Berdasarkan surat bersama /23 dan Menteri PPN/Bappenas Nomor B.664/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2024 sebesar Rp305.661.469.000,00 untuk selanjutnya dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran DPR RI.

Kemudian berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 perihal Penyampaian Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023, disampaikan hasil pembahasan belanja kementerian K/L sebagai bahan penyempurnaan RKA K/L di komisi dengan mitra kerjanya. Dengan rincian alokasi anggaran belanja K/L tahun 2024 yaitu pagu anggaran Kementerian BUMN Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 disepakati sebesar Rp308.016.126.000,00. Nilai tersebut bertambah dari anggaran yang diajukan sebelumnya dikarenakan adanya perubahan terkait dengan kenaikan gaji sebesar Rp2.354.657.000,00. Selanjutnya Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN agar mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan program kegiatan yang sudah direncanakan.

Terkait hal tersebut, kami akan mempersilakan kepada Menteri BUMN Republik Indonesia untuk menyampaikan tanggapan terhadap penyesuaian RKA K/L tahun anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan.

MENTERI BUMN RI (DR. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Syalom,
Om swastiastu,
Nammo buddhaya,
Salam kebajikan,

Tentu Pimpinan dan para wakil rakyat Komisi VI yang hadir hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi VI untuk penambahan daripada anggaran yang tersedia untuk kementerian. Mungkin itu sementara, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Untuk RKA K/L tidak ada masalah, kita akan mengambil kesimpulan dulu, silakan Pimpinan untuk ditetapkan. Karena pembahasan pendalaman sudah ditetapkan sebelumnya, kita bisa setuju ya? Prinsipnya Kementerian BUMN akan melaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan program kegiatan yang direncanakan.

Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Kesimpulan, entar dulu saya bacakan. Kesimpulan yang pertama,

Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2024 sesuai surat Badan Anggaran DPR Republik Indonesia Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 tanggal 11 September 2023, perihal Penyampaian Hasil Pembahasan RUU APBN tahun 2023 sebesar Rp308.016.126.000,00. Sesuai Badan, sesuai surat Badan Anggaran DPR Republik Indonesia tersebut, Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian BUMN dapat segera menyampaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 15 September 2023 untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.

Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Menteri BUMN yang telah menyampaikan penjelasannya dan kita sudah membuat kesimpulan rapat hari ini. Untuk hal-hal yang lain, apakah masih ada teman-teman yang mau menyampaikan? Kalau tidak ada, akan saya *ketok* untuk menutup acara hari ini. Dari daftar yang mengajukan pendalaman *kok* ya masih banyak *banget* ya?

F- P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Tema lain-lain, Mas Bimo, itu kan tema lain-lain, kalau ini *udah* selesai.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dengan demikian, acara lain-lain akan saya buka.

Saya kira mengenai penyertaan modal negara perlu kami dengarkan, Pak, perkembangannya seperti apa yang disetujui dan terutama alasan-alasan *kenapa* sampai tidak ada persetujuan seperti yang sudah kita usulkan atau kita alami di Rapat Kerja Komisi VI. Maksudnya begini, bahwa mengenai PMN, pembahasan yang menyangkut korporasi itu betul-betul kita cermati, tidak hanya aspek ketersediaan keuangan negara, tapi dasar pemberian PMN. Kemudian prasyarat pemberian PMN, kemudian dampak pemberian PMN, kemudian juga terkait dengan *excess*. Bahkan kita pun juga menghitung betul, sejauh mana peran Kementerian BUMN di dalam memutuskan perusahaan PMN, juga terkait dengan usulan RKA K/L, di mana semua

keputusan hal yang terkait keputusan politik anggaran termasuk PMN, tidak bisa lepas dari target peningkatan produk domestik bruto kita terkait dengan konsumsi peningkatan, konsumsi peningkatan investasi. Maka kalau ada hal-hal koreksi terhadap hasil dari rapat Komisi VI di dalam memberikan persetujuan PMN, ada hal-hal yang akhirnya diberi dan tidak diberi, mohon diberikan penjelasan kepada kami di forum rapat ini.

Waktu dan tempat kami persilakan.

MENTERI BUMN RI (DR. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Mungkin saya langsung saja ke *slide* mengenai hasil diskusi kami dengan, tentu, Banggar, yang berlangsung kemarin. Nanti tambahan dari Pak Tiko, untuk detailnya.

Nomor satu, PMN definitif yang akan diberikan kepada BUMN, ini yang terakhir, Pimpinan dan para Anggota Komisi VI, akan diberikan kepada BUMN senilai 28,16 triliun yaitu pembagiannya dari HK 18,6, lalu dari untuk IFG itu penyelesaian daripada, sebenarnya sitaan yang ada di Kejaksaan Agung yang berupa barang, tetapi tentu *kan* ditukar dengan *cash* atau uang tunai. *Nah*, ini nanti masuk bantuan daripada penyelesaian untuk IFG Jiwaseraya itu 3,56, lalu Wijaya Karya 6.

Nah memang dari diskusi kemarin, ada dialokasikan dimasukkan di cadangan investasi yang menjadi keputusan mereka yaitu 12,8. Tentu di sini yang kita kembali diskusikan, walaupun detailnya nanti tergantung daripada keputusan daripada cadangan investasi, yang sebenarnya kita sudah bahas cukup mendalam sebelumnya untuk kereta api itu ada 2 triliun, lalu untuk IndonesiaRe itu 1 triliun, lalu untuk Pelni 3 triliun, lalu untuk INKA, untuk peningkatan produksi daripada gerbong yang dibutuhkan itu ada 1 triliun, lalu ada koreksi untuk PLN itu 5,86 yang dulunya 10, untuk digunakan untuk elektrifikasi desa, lalu untuk ID Food itu 832. *Nah*, ini yang memang sementara hasil diskusi terakhir dan mudah-mudahan seperti ini akan disetujui tetapi mekanismenya seperti ini yang ditawarkan.

Tentu saya akan memberikan catatan tambahan di *slide* berikutnya. Jadi kalau kita lihat, sesuai dengan target awal antara arahan Komisi VI dan kami, kalau bisa proporsi PMN dan deviden itu seimbang. *Nah*, *alhamdulillah* seperti ini kalau ini semuanya berjalan dengan baik, deviden itu 54% dibandingkan PMN 46%. Dan kalau kita lihat deviden yang kemarin hasil diskusi dengan Baleg, kita ditargetkan lebih tinggi lagi, kalau kemarin kita 80,6 sekarang mereka menargetkan 85,6 eh 85,04, maaf, itu jadi ada peningkatan. Dan kemarin hasil diskusi internal kita coba menyanggupi, artinya ini tentu prestasi yang luar biasa dari Komisi VI dengan Kementerian BUMN, ketika deviden ini *back to back* memecahkan rekor yang sebelumnya itu 80,6 sekarang lebih tinggi lagi, ini prestasi yang luar biasa.

Lalu kita juga detailkan mengenai kontribusi pajak, itu juga terus konsisten, lalu juga kapilasi pasar, kemarin juga kita paparan ke Bu Menkeu ini terus ada peningkatan sekarang valuasi daripada pasar BUMN itu, kalau yang ada di bursa itu naik dari 1,719 sekarang 2,2 ribu triliun. Jadi ini saya rasa kalau dulu kita pernah bahas antara hutang BUMN yang 1.600 dibandingkan modal 3.200, sekarang kapitalisasi pasarnya sendiri 2.200 triliun itu sudah jauh lebih tinggi daripada tentu total hutang 1.600. Jadi ini kondisinya saya bisa yakinkan, ini sehat.

Mungkin dari Pak Tiko, silakan tambahan sedikit, Pak Tiko.

Terima kasih.

WAKIL MENTERI BUMN I (KARTIKA WIRJOATMODJO):

Terima kasih, Pak Menteri.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI dan Anggota,

Saya tambahkan sedikit *aja*, Pak, untuk yang Utama Karya, Bapak-Ibu yang 18,6 ini sebenarnya terpecah dua. Ini ada porsi yang nantinya untuk membantu tol yang diselesaikan oleh Waskita itu 12,5, itu nanti kita gunakan untuk penyelesaian juga permasalahan di Waskita. Yang untuk Utama Karya murni itu 6,1 itu untuk penyelesaian beberapa ruas di tol Trans Sumatera yang kita harapkan selesai di 2024. Yang Wijaya Karya, ini ada pengurangan dari usulan awal 10, tapi menurut kami 6 cukup memadai, nanti mungkin 2025 kita akan tambahkan lagi 4-nya lagi, bahwa untuk periode sekarang *udah* memadai.

KAI, INKA sebagaimana kita bahas di Komisi VI, ini terkait dengan produksi daripada kereta rel untuk *commuter* Jakarta yang mulai 2025 kita harapkan nanti akan didalam dibuat di dalam negeri, di INKA di pabriknya yang di Banyuwangi, jadi di INKA ini termasuk untuk pembangunan fasilitas produksi INKA di Banyuwangi. Untuk Pelni, ini untuk peremajaan kapal, sebagaimana kita tahu kapal Pelni ini sebagian besar sudah berumur 30 tahun ke atas, kita akan mulai peremajaan program tiga tahun, bertahap. Dan PLN tadi seperti yang disampaikan Pak Menteri, ada pengurangan tapi kami sudah cukup untuk saat ini untuk listrik desa 5,86 triliun. Dan untuk ID Food yang terkait dengan penguatan modal untuk intervensi pangan, khususnya kerja sama dengan Bapanas, untuk stabilisasi harga di pangan.

Demikian, Bapak-Ibu, terima kasih.

MENTERI BUMN RI (DR. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Terima kasih, Pak Wamen Tiko.
Mungkin saya kembalikan kepada Pimpinan.

WAKIL KETUA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sebentar izin, Pak Pimpinan.

Pak, ini saya lagi lihat-lihat kok ada Indonesia Re lagi ya? Perasaan kemarin kan sudah di masukan ke dalam yang 5,7 triliun, cadangan investasi 2023.

WAKIL MENTERI BUMN I (KARTIKA WIRJOATMODJO):

Jadi yang kemarin, Pak, yang cadangan investasi tahun ini, itu akhirnya hanya untuk IFG dan beberapa untuk yang eksisting 2023 ini yang segera cair *aja*, Pak, jadi itu digeser ke 24, 2024, *enggak* dapat di 2023 akhirnya.

WAKIL KETUA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Memang dipotong atau ada yang diganti di dalam 5,7 itu?

WAKIL MENTERI BUMN I (KARTIKA WIRJOATMODJO):

Dipotong, Pak, bukan digeser ke 24, sama Bina Karya

WAKIL KETUA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dipotong ya? saya baca diberita ada Bina Karya, itu Bina Karya BUMN siapa ya?

WAKIL MENTERI BUMN I (KARTIKA WIRJOATMODJO):

Iya Bina Karya itu *kan*, Bina Karya itu *kan* kita serahkan ke Otorita IKN, Pak, sebagai BUMN-nya Otorita IKN, jadi kemarin uangnya dipakai untuk modal meresmikan untuk Bina Karya, Pak, Otorita IKN.

WAKIL KETUA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Maksudnya, *enggak*, Bina Karya ini BUMN di bawah binaan?

WAKIL MENTERI BUMN I (KARTIKA WIRJOATMODJO):

Otorita IKN Pak, baru, Pak.

WAKIL KETUA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh, Otorita IKN ya?

WAKIL MENTERI BUMN I (KARTIKA WIRJOATMODJO):

Iya.

WAKIL KETUA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

WAKIL KETUA (FAISOL RIZA, S.S./KETUA KOMISI VI DPR RI):

Maaf, yang Bina Karya itu BUMN atau bukan ya?

WAKIL MENTERI BUMN I (KARTIKA WIRJOATMODJO):

Ini BUMN, Pak, tapi pengelolaannya sekarang kita serahkan melalui proses PP, menjadi pengelolaannya di bawah Otorita IKN, itu baru kita serahkan, untuk nanti mereka digunakan untuk KPBU, Pak, seperti pembangunan jaringan fiber optik, jaringan gas di IKN.

WAKIL KETUA (FAISOL RIZA, S.S./KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi tidak diajukan oleh kementerian berarti?

WAKIL MENTERI BUMN I (KARTIKA WIRJOATMODJO):

Tidak, tidak, Pak, tidak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Demikian Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, jadi kita mengacu apa yang disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, berdasarkan nota keuangan RAPBN tahun 2024 dan rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, PMN definitif akan diberikan kepada BUMN dengan nilai Utama Karya 18,6T, Indonesia Finance Group 3,56T, Wijaya Karya 6T. Sedangkan PMN cadangan investasi 12,8T akan didiskusikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.

Namun demikian, PMN terkait cadangan investasi tersebut akan diprioritaskan kepada BUMN-BUMN sebagai berikut:

- KAI untuk pengadaan kereta melalui retrofit pembelian baru sebesar 2T,
- Indonesia Re untuk penguatan permodalan 1 T
- Untuk Pelni yang kapalnya sudah *bobrok-bobrok*, ini kalau *enggak* dibantu bisa tenggelam ini, Pak, untuk pembelian kapal penumpang dan angkutan perintis, ini *udah* bertahun-tahun mengajukan, semoga ini dapat, Pak, kita harapkan menjadi prioritas, yaitu 3 T,
- Meningkatkan INKA, untuk meningkatkan kapasitas produksi supaya, meningkatkan kapasitas produksi 1 T, supaya Andre Rosiade *enggak* ribut terus, INKA 1 T,
- Untuk PLN akan digunakan untuk elektrifikasi desa 5,86 T, dan
- ID Food pembangunan *cold storage* dan modal kerja sebesar 832 miliar,

Usulan ini kita setuju dalam rapat ini sebagai bahan

WAKIL KETUA (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sebagai bahan.

WAKIL KETUA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Untuk dibahas di kita.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Untuk dibahas di kita. Yang ini kan, Pak, yang nanti kita panggil satu-satu *kan*?

WAKIL KETUA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, iya, iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi KAI, Indonesia Re, Pelni, INKA, PLN, ID Food, akan kita panggil lagi. kalau yang definitif, ini *kan*. Iya kita bahas ini, Pak, ya besarnya ini ya? Kita setuju untuk kita bahas. Kemudian apakah masih ada pendalaman lagi?

F- PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):

Pak Bimo, sedikit, Pak Bimo.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ini pertanyaan jadi? Oh di luar itu? dan lain-lain. Kalau Andre Rosiade dikasih waktu, langsung pergi dia.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Mas Bimo, saya protes *loh*, Mas, saya rapat dengan Menteri Investasi dari awal sampai akhir *loh* kemarin, malah Mas Bimo yang saya *enggak* lihat, ke mana Mas Bimo kemarin? Padahal saya dari pagi *loh*, dari Solo, habis nonton bola saya pagi-pagi,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya kira kali itu memang tidak pergi, tapi biasanya langsung keluar di Detik, terus *enggak* ada. Kami persilakan Pak Andre Rosiade. Lihat ya, jangan pergi.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Enggak, enggak pergi kita.
Baik

Pak Mas Bimo yang ganteng dan gagah perkasa, *Inshaallah* kalau Prabowo Presiden, jadi Menteriya Pak Prabowo, dan seluruh Pimpinan, Pak Menteri dan seluruh jajaran,

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Pak Menteri, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat, Pak Menteri, sebagai Ketua Umum PSSI mencetak dan mencatat sejarah pertama dalam negara kita, untuk pertama kalinya Indonesia lolos ke piala Asia U23, ini patut kita apresiasi. *Udah*, kita yang serius-serius *aja*, Mbah.

Yang kedua, Pak Menteri, saya ingin sampaikan kepada Pak Menteri, bahwasanya ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita, menjadi perhatian, Pak Menteri. Pertama *insyaallah* Presiden Jokowi akan meninggalkan *legacy* bagaimana soal Moto GP, *insyaallah* tanggal 13 sampai 15 Oktober itu akan ada Moto GP di Indonesia ya, di bawah Pak Tiko *tuh*, In Journey. *Nah*, saya sudah mempelajari melihat bahwa semuanya *on the track* bahwa ITDC, MGPE, sudah bekerja luar biasa untuk mempersiapkan ini. Tapi ada masalah Pak Menteri, *hosting fee*. Ada *hosting fee* 190 miliar yang harusnya dibayarkan oleh Pemerintah ke Dorna, itu belum diselesaikan. *Nah*, saya tidak setuju kalau BUMN yang membayarkan itu, itu adalah tanggung jawab Pemerintah. *Nah*, saya melihat Pak Tiko sebagai Wamen Pak Menteri ini sudah nempel terus dengan Wamennya Kemenparekraf, ya Tante Evita, di Instagram berdua terus ya? Tapi ternyata uangnya belum cair-cair. *Nah*, saya minta soal *hosting fee* ini yang 190 miliar, Pak Menteri BUMN laporkan Presiden untuk dibawa ke dalam ratas, supaya ini segera selesai jangan bertele-tele, karena 13 sampai 15 Oktober ini adalah Moto GP terakhirnya Presiden Jokowi ya. Dan Pak Presiden saya tahu ingin ini sukses luar biasa, dan kita tahu animo Motor GP luar biasa, itu satu.

Yang kedua, saya agak prihatin lihat Pak Arya yang di pojok itu, Pak Menteri, mukanya agak sedih karena timnya *dikerjain* kemarin di Liga 2 ya. Bayangkan, *Ex co* yang terpilih dan jadi *aja* masih bisa *dikerjain*, Pak Menteri, *dikerjain*, ya di Liga 2. Apalagi saya, *Ex co* gagal ya, ya. *Endak* ini penting ini, ini penting dan ini harapan seluruh rakyat, bahwa untuk itu Pak Menteri,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Apa PSSI kita jadikan BUMN dulu, Pak?

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Eenggak, ini penting, Mas Bimo, karena saya rasa bola ini juga hampir 90% rakyat Indonesia mencintai sepak bola. Makanya hati-hati Mas Bimo jangan sampai kita gagalkan piala dunia di Indonesia.

Jadi saya ingin meminta, Pak Menteri, dalam kesempatan ini, ya supaya Arya Sinulingga saja, Wakil Menteri III orang kepercayaan Pak Menteri masih digergaji ya oleh wasit, untuk itu saya usulkan secara resmi ke Pak Menteri, untuk bentuk satgas mafia wasit ya, supaya jangan kita *dikerjain* terus,

F- PG (NUSRON WAHID):

Masak ngomongnya di sini.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Eenggak apa-apa. Itu yang kedua.

Yang ketiga, ya saya ingin menyampaikan aspirasi dapil saya, Pak Menteri. Aspirasi dapil saya, kebetulan kami punya rumah sakit terbesar di Sumatera Barat di Kota Padang, namanya rumah sakit M. Djamil. Rumah sakit M.Djamil ini adalah punyanya Kementerian Kesehatan. Kami masih membutuhkan perluasan rumah sakit M.Djamil ini, kita butuh tambahan 250 kamar rawat inap yang bisa menampung 15 ribu pasien per tahun. *Alhamdulillah*, rumah sakit M. Djamil sudah mengadakan rapat dengan pihak Kementerian Kesehatan, PT KAI difasilitasi oleh kantor Staf Kepresidenan waktu itu dan disetujui bahwa PT KAI bersedia untuk melepas, dan juga Komisaris KAI sudah melakukan rapat untuk melepas ini, dan Dirut KAI juga sudah bersurat dengan Kementerian BUMN.

Yang kami minta sebagai wakil rakyat yang mewakili Sumatera Barat, yang pertama, harganya tolong dibantu menjadi harga yang sangat, sangat efisien, karena ini kebutuhan masyarakat Sumatera Barat, yang kedua, tolong Pak Menteri, prosesnya dipercepat. Dan untuk itu saya minta waktu sama Pimpinan untuk menyerahkan surat ini, Pimpinan, Mas Bimo, ke Pak Menteri secara langsung, sebagai tugas saya tanggung jawab saya kepada konstituen kami di Sumatera Barat. Mohon izin ya Mas Bimo, eh Pak Sarmuji, mohon izin, Pak Sarmuji.

WAKIL KETUA (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, ini suratnya ada di saya juga ini.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Iya ini surat resminya, iya saya izin ya.

(PENYAMPAIAN SURAT ASPIRASI DAPIL SUMATERA BARAT)

WAKIL KETUA (FAISOL RIZA, S.S./KETUA KOMISI VI DPR RI):

Keluarnya bareng itu di Detik.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Jadi terima kasih Pak Menteri atas waktu dan kesempatannya, terima kasih Pimpinan, itu bukti kerja nyata Partai Gerindra bukan sekedar amin-amin saja, terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Selanjutnya, kami persilakan, Mba Evita Nursanty.

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati,

Jadi targetnya naik 5 T ini untuk deviden, Pak, berat juga ya, kalau saya lihat yang menghasilkan deviden itu perusahaannya itu-itu *aja* di BUMN, Pak, ya *kan*. *Enggak, enggak* ada yang nambah *nih*, Pak, *nah gimana nih* strategi Pak Menteri bisa menaikkan ini dan saya juga berharap ke depannya penyumbang kontribusi deviden ini dari BUMN bertambah perusahaannya, Pak, tidak hanya itu-itu saja.

Saya mengapresiasi Pak Menteri, langkah yang diambil oleh Kementerian BUMN ikut dengan sigap, ya Pak Menteri ya, mengatasi yang namanya fluktuasi harga beras ya *kan*, kita tahu Pak Jokowi sudah ke Bulog dan lain-lain. Namun kalau saya melihat apa yang tadi PMN tadi, Pak, bahwa Indofood itu hanya dapat 835 dengan ancaman yang kita hadapi, kelangkaan pangan ke depan, menurut saya itu kecil, Pak, untuk permodalan Indofood ya *kan*. Karena *oke* lah sekarang ini dengan diberikannya beras kepada masyarakat, itu hanya langkah sementara untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sementara yang kita inginkan untuk pangan ini bukan langkah-langkah seperti pemadam kebakaran maksud saya, Pak. Jadi ada ini-nya, langsung bergerak, ke depannya ini seperti apa, Pak? Harusnya Indofood itu diberikan modal yang besar, bagaimana bisa membuat *grand*, suatu *grand design* permodalan ke depan ini kita itu mampu untuk mendapatkan ketahanan pangan.

WAKIL KETUA (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Izin Bu, Bu, izin-izin ralat, bukan Indofood, ID Food.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

ID Food, *sorry, kok* Indofood, salah.

WAKIL KETUA (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nanti dicoreng lagi, repot kita.

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Kok Indofood, salah. *Loh* jadi promosi Indofood, jadi promosi Indofood. Makanya, apalagi pakai bawang goreng *ama* cabai rawit ya *kan*. Terus jadi ID Food, Pak. Menurut saya kecil sangat kecil, ketika permodalan, apa namanya, ID Food ini hanya 830 sekian, sementara kita menghadapi ancaman, ini ancaman global yang kita hadapi ketahanan pangan ini. Kita tahu sekarang negara-negara itu melarang ekspor beras mereka, India dan lain-lain. Terus kita *gimana* nanti ke depan, ketika bertambah negara-negara untuk menghadapi ketahanan pangan di negara-negara tersebut, kita *enggak* bisa impor, apa yang akan kita lakukan? Jadi saya minta BUMN ke depan ini konsentrasi, Pak, untuk yang namanya ketahanan pangan.

Dan saya menginginkan BUMN ini memang jadi garda terdepan untuk ketahanan pangan kita, Pak. Jadi beras, ya, Pak, ya dibagikan. Padahal kita tahu, saya tahu teman-teman yang juga mempunyai dapil pertanian, masalahnya itu ada yang belum terselesaikan, yaitu masalah pupuk, masalah kelangkaan pupuk begitu *loh*. Ini kalau masalah ini tidak terselesaikan, ya susah, Pak, mau ketahanan pangan apa, Pak? Sementara kan saya lihat *kan* baguslah sekarang hasil apa namanya, produsen pupuk, Pupuk Indonesia itu cukup bagus *performance*-nya ya *kan*, Pak, ya, tapi *kan* masih punya masalah di distribusi sekarang ini. *Nah*, maksud saya ketika kita ingin memiliki ketahanan pangan ke depan, ini ID Food, Bulog, dan lain-lain ini harus duduk, ini *design grand design* ke depannya seperti apa *nih* untuk ketahanan pangan? Tidak bisa harga tinggi, bagi-bagi beras, harga ini mau sampai kapan seperti itu? Hanya *temporary solution*. Kita mau solusi yang jangka panjang yang bisa dilakukan oleh yang namanya Kementerian-Kementerian BUMN ini, Pak.

Jadi kalau misalnya Pelni, Pak, tadi *kan* saya lihat, memang harus wajib. Saya ingin mendapatkan masukan *aja*, Pak, saya ke Ambon ketemu dengan turis asing di Ambon. Mereka komplain, ada yang di komplain, *kan* mungkin bisa dipertimbangkan ketika nanti meng-*upgrade* Pelni ini. Dia menyayangkan perubahan yang dilakukan oleh Pelni, tidak ada lagi *suite room* sekarang, Pak. Pelni sekarang itu mengubah kapalnya tidak ada *suite room*, sementara di Indonesia Timur itu, saya juga *surprise*, Pak, rupanya turis-turis asing itu masih mempergunakan Pelni untuk dari satu tempat ke satu tempat. Tapi mereka bilang "Susah *banget* kita sekarang kadang *enggak* ada kamar yang *decent*, yang untuk Pelni". *Nah*, mungkin dipertimbangkan ketika dilakukannya apa namanya, revitalisasi daripada Pelni ini, kebutuhan daripada pariwisata untuk apa namanya, untuk Pelni ini juga bisa dilakukan.

Saya rasa itu saja Pak, saya hanya ingin pesan-pesan benar, Pak, mengenai pangan ini, Pak. Ini sangat penting dan saya rasa masalahnya tetap saya katakan, Pak, di level bawah ini *enggak* pernah bisa selesai mengenai pupuk ini. *Kayaknya* harus Pak Menteri BUMN, Menteri Pertanian, ini duduk bersama, Pak, baru bisa, baru bisa selesai, kasihan rakyat petani-petani di Dapil, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Selanjutnya kami persilakan Eyang Subardi.

F- P. NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Pak Menteri BUMN beserta jajarannya yang lengkap yang saya hormati,

Saya ingin ada beberapa hal yang *enggak* terlalu banyak, soal dari kebijakan hulu, Pak Menteri. Tadi mungkin sedikit *nyambung* yang disampaikan Bu Evita tadi bahwa memang BUMN bukan ranahnya BUMN ya, *kayak* ada urusan produksi beras, gula, dan sebagainya, itu kan tidak mutlak menjadi domainnya dari kepada Kementerian BUMN. Tetapi ada punya dampak ya terhadap BUMN, dalam kinerja holding umpamanya holding apa, holding pangan ya ada holding gula, PTP dan sebagainya, dan kaitan pupuk juga, semua itu ada di ranah BUMN.

Nah, salah satu contoh saya menyoroti tentang dari produk hulu. Yang pertama dari beras, padi ya, *masak* petani padi sekarang atau petani bahkan mayoritas petani, sekarang itu ada persoalan yang sangat krusial yaitu soal kelangkaan pupuk, mahalnya pupuk, karena apa? Karena subsidi pupuk, pupuk itu, subsidi pupuk itu dikurangi dan tidak semua *nyampe*, sehingga terpaksa para petani itu beli pupuk yang non subsidi yang harganya jauh lebih mahal. *Nah*, sehingga produksi-produksi yang mereka lakukan itu tidak menghasilkan suatu *profit* yang berarti.

Kemudian juga yang punya pengaruh besar itu adalah soal produksi gula ya. Pabrik-pabrik gula dari BUMN itu kan sebagian besar juga, apa, tebunya dari rakyat, dari petani, mungkin ada namanya, APTRI dan sebagainya, bukan semuanya lahan yang dimiliki oleh baik PTP maupun RNI, tidak seluruhnya. *Nah*, di situ juga ada hambatan atau kesulitan ketika mereka itu beli pupuk mahal, langka pupuk ya, *nah* kemudian berdampak pada pabrik juga yang pabrik atau pun BUMN kita, PTP atau pun RNI atau pun pabrik-pabrik gula itu juga tidak cukup punya modal untuk memberikan, apakah semacam pinjaman atau uang muka para petani di dalam rangka untuk membeli pupuk, untuk membeli bibit, dan sebagainya. Tidak seperti zaman dulu lah, ini perubahan ini. *Nah*, ini mempersulit dari pabrik untuk mendapatkan tebu yang, yang secara pasti dalam satu tahun giling itu mendapatkan sesuai dengan program. *Nah* sehingga ada kompetisi atau pun persaingan di dalam membeli tebu pada petani ini. *Nah*, sehingga ada yang punya pabrik tebu yang punya modal tentunya akan dapat tebu banyak sehingga punya masa giling yang tinggi.

Nah ini yang menjadi masalah, *nah*, memang walaupun ini semuanya itu bukan domainnya Kementerian BUMN, saya menyarankan atau menghimbau, bagaimana rakyat, masyarakat petani ini diberdayakan tapi tentunya ini harus ada peran Pemerintah khususnya antara Kementerian BUMN sebagai pemilik pabrik-pabrik, itu *kan*, Kementerian Pertanian atau lembaga lain, perbankan, dan sebagainya diberikan. Kalau zaman dulu ada namanya Kredit Usaha Tani (KUT) ya, sekarang *udah enggak* ada lagi, adanya KUR, KUR tidak mesti bisa digunakan untuk petani-petani ini.

Nah oleh karena itu bagaimana Kementerian BUMN menyiasati agar pabrik-pabrik BUMN yang kita miliki tetap surplus, untuk bisa mengampu atau pun bisa membina para petani sehingga petani menjadi, menjadi punya *spirit* untuk menanam tebu, juga bagaimana petani ini dari hulunya ini, petani ini diberikan *supporting* agar ada pupuk murah, kemudian ada modal kerja untuk kerja juga, apakah pinjaman dari pabrik atau, atau uang muka atau apa dan sebagainya. *Nah*, sehingga target dari produksi dalam negeri kita yang telah ditargetkan, ya itu tercapai. Otomatis kalau itu kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah secara sinergi antar

kementerian dan lembaga, otomatis target yang, yang diinginkan ini *kan* tercapai, bahkan bisa meningkat, karena *spirit* masyarakat rakyat petani untuk menanam tebu itu akan bisa tumbuh. Beda ketika masyarakat *nanam* tebu, sudah pesimis karena *wah* malu rugi, *enggak* laku, dan sebagainya ini.

Nah berikutnya tentunya Pak Menteri, kita tahu bahwa beberapa BUMN kita, terutama yang kemarin juga kami sampaikan, soal BUMN Karya ya, yang itu banyak mengalami sebuah permasalahan, sebaiknya secepatnya bagaimana mengatasi BUMN Karya itu dengan holding tertentu ya, apakah di beberapa *cluster gitu* atau bagaimana atau konsepnya, kalau *enggak* salah dulu Pak Menteri telah memberikan ini. Jika terealisasi sehingga tidak, tidak lagi terlalu lama mereka mengalami suatu proses yang, yang istilahnya kalau boleh saya katakan, mengenangkanlah. Bagaimana secara cepat ini bisa teratasi sehingga dalam mendukung infrastruktur kita, itu cepat bisa terselesaikan.

Mungkin itu *aja*, Pimpinan.
Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kami persilakan, Pak Khilmi.

F- P. GERINDRA (KHILMI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Ketua Komisi VI beserta Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati Pak Menteri BUMN, Pak Wamen I, Wamen II, Wamen III, beserta jajaran,

Jadi saya ini singkat-singkat *aja*, Pak, dengan nasib BUMN dan juga pejabat karir di BUMN. Karena apa? Pergantian pejabat di situ, kalau di pejabat situ *enggak* suka dengan pejabat karir yang di situ, bisa disingkirkan. Ini *kan* *enggak* bagus, padahal seorang untuk membesarkan BUMN itu bukan yang dari datang, langsung, dia itu adalah pejabat karir dari situ. Bisa besar tidaknya BUMN adalah dari Karyawan-Karyawan yang kecil itu dulu, bukan yang sudah besar, dia menempati jabatan, habis itu *bikin* kebijakan, kalau tidak disukai ya dipindah. Ini banyak di BUMN, kita *enggak* perlu *nyebutin* satu-satu tapi mohon kiranya Kementerian BUMN itu bisa memilah-milah mana BUMN yang *kayak* begitu itu.

Jadi saya ini apa ya, berteman dengan orang-orang BUMN itu semenjak lulus SMA, saya bekerja. Saya lihat di situ itu, mana orang yang pandai, mana *enggak*, itu banyak. Tapi orang pandai sekarang belum tentu bisa jadi direksi. Mana pejabat yang bisa di BUMN itu yang bisa, dari pabrik satu bisa menjadi pabrik tiga, pabrik empat, *enggak* ada sekarang. Kita ini kasihan, Pak, yang membesarkan BUMN adalah pegawai-pegawai yang dari pejabat karir itu. Tapi kalau terjadi ini terus-menerus *kayak* begini, saya sebagai Anggota DPR RI yang dipilih oleh rakyat, kemungkinan orang BUMN juga ada yang memilih saya, saya mewakili suara ini. Karena banyak sekarang, direksi ganti, orang yang kerjanya lurus-lurus pun juga nanti digeser, karena dia tidak suka dengan orang itu, mungkin *kan* begitu. Itu banyak, bukan di BUMN satu-satu saja. Dan saya berharap untuk BUMN-BUMN Karya ini kita perlu menyelamatkanlah.

Kemarin kalau di Bukit Asam, Timah, Pertamina, itu kalau kontraktornya bukan BUMN, mungkin industri-industri yang dibuat di situ itu tidak akan jadi.

Jadi saya harapkan banyak BUMN Karya yang masih eksis, tapi memang keuangannya itu karena rugi atau karena memang PSO yang dikerjakan oleh dia dari pemerintah itu bayarnya lama atau *enggak*, itu saya tidak tahu. Tapi kalau saya hitung-hitung memang kalau tanggungan hutang yang sangat besar *kayak gitu*, karena bunga *aja* mungkin seperti misalnya ini yang kereta api cepat. Hitungan Wika itu harus menyetor saham sebesar 11 T, Pak, ya? Kalau dia itu hutang duitnya hutang, *enggak* tahu itu 6 T atau 5 T lah, kalau duit hutang, itu kena bunga *aja kan udah* 120 miliar sebulan. *Lah* kalau satu tahun *udah* triliunan sendiri.

Jadi saya berharap, Karya-Karya ini, Pak, yang dari penugasan memang hitungannya tidak masuk, tetapi dia mempunyai tanggung jawab bagaimana infrastruktur ini bisa selesai, itulah yang harus diselamatkan *gitu loh*. Supaya dia ini *ngerjaan*, kerjaan yang lain, vendor *udah enggak* mau bekerja sama dengan dia lagi. Jadi dia *kan* dapat order tapi tidak bisa *ngerjakan, kan gitu*, Pak.

Jadi saya *kepengin* Pak Erick ini sebagai menteri yang bisa mendapatkan tambahan keuntungan yang tinggi, tapi keuntungan itu *kan* dari itu-itu *aja* Pak, dari perbankan, Telkom, terus perusahaan-perusahaan yang dapat PSO, calon Wakil Presiden kasih pencerahan dulu, Indonesia Maju harus begitu, nanti supaya *enggak* salah kebijakannya. Jadi ini *kan* harus ada perubahan, jangan perubahannya Pak Nasim. Kita ini merubah yang maju yang lebih bagus, *endak*, titik nol, dia, harus ke *anu*, kalau titik nol itu, Pak Andre, ke IKN, ya foto dulu.

F- PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Setuju Pak Khilmi, jangan digantung tapi ya.

F- P. GERINDRA (KHILMI):

Iya jadi, jadi begini, Pak, jadi Pak Erick, Pak Menteri ya, ini banyak kejadian Pak, di BUMN-BUMN, pergantian direksi, pergantian kebijakan, padahal jabatan ini *kan* tinggal sedikit, pemerintahan ini kira-kira tinggal setahun setengahlah, katanya Pak Bahliil kemarin, *kan gitu*. Takutnya nanti ada kebijakan pergantian menteri atau pergantian direksi, terus meninggalkan yang tidak bagus *kan* yang setelah bagus ini.

Jadi menurut saya untuk pangan ini, Pak, ya, kita ini sebetulnya yang harus diperbesar, pupuk kita ini, pabrik pupuk kita ini bukan di urea lagi, Pak. Urea ini *udah gede gitu loh*. Kalau Bapak membangun urea lagi dengan investasi yang tinggi, sebaiknya NPK-nya ini, Pak, yang masih kurang. Jadi teman-teman tadi *kan* bilang, pupuk masih kurang. Karena ini kebijakan pupuk ini *kan* dari Kementerian Pertanian. Karena alokasinya sedikit, sebetulnya dari Pak Erick ini kementeriaannya bisa mencukupi tapi *kan* subsidiya yang kurang. Jadi mohon kiranya dengan persaingan ini, Pak. Terus pabrik gula, Pak, pabrik gula kita ini, BUMN ini juga sangat riskan Pak, sekarang karena ada pabrik-pabrik gula swasta yang ada di sekitarnya. Jadi petani, pembinaannya *udah* dari PTPN. Tapi dalam kondisi panen tebu yang sangat berkurang ini Pak, pabrik mana yang lebih tinggi, tebunya itu akan dijual yang ke pabrik gula swasta. Jadi ini harus diantisipasi, untuk kebutuhan tebunya pabrik-pabrik di PTPN ini. Karena,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bisa dipersingkat?

F- P. GERINDRA (KHILMI):

Udah ya?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Mohon waktunya.

F- P. GERINDRA (KHILMI):

Iya. Jadi itu *aja*, Pak Menteri, saya titip, kalau ada pergantian direksi, jangan sampai pejabat karir yang di situ itu juga kena imbas dari kedatangan direksi yang baru itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaiikumsalam,

Selanjutnya, Pak Amin.

F- PKS (AMIN AK, M.M.):

Makasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Menteri, Pak Erick dan Pak Wamen, dua Wamen dan semua jajaran yang saya hormati,

Ada dua pertanyaan, Pak, dari saya, semuanya sekitar tentang PMN. Pertama PMN untuk HK ini 18,6 T, Pak ya. Jadi HK ini *kan* menerima PMN dari tahun 2020 ya, Pak, terus-terusan dan itu sangat besar nilainya. Apa namanya, pertanyaan saya, apakah sudah ada evaluasi Pak, yang terkait dengan penggunaan PMN ini. Apa saja hasilnya atau sampai di mana prosesnya, progresnya, apa *aja* hasilnya, apakah juga sudah ada audit, apa juga ada yang bisa diukur dari sisi *multiplier* efeknya misalnya, ya. Karena kalau saya baca-baca juga ini *enggak* tahu ini *kan* namanya baca media, Pak, *ICOR* pembangunan infrastruktur kita untuk saat ini, ini nilainya 7,4 sedangkan kurang lebih 10an tahun yang lalu itu masih 4, *Incremental Capital Output Ratio*-nya, artinya untuk satuan yang sama, itu biayanya hampir dua kali lipat, artinya lebih boros ya, lebih borosnya hampir dua kali lipat. *Nah*, tentu ini pertanyaannya, apa ini yang menjadi penyebabnya, apakah memang semata karena kenaikan harga bahan atau ada faktor-faktor lain, ya, makanya perlu ada evaluasi, perlu ada audit, dan juga ini dampaknya *udah* sampai di mana *sih*, dampak positif atau bahkan mungkin juga ada dampak negatif dari pemberian PMN yang 5, 4 tahun ya? Dari tahun 2020 seingat saya, berturut-turut HK ini cukup, cukup besar. Bahkan kemarin, walaupun di sini *enggak* ada *nih* ya, saya baca *enggak* ada tadi dipresentasikan Pak Erick. *Kan* sempat ada usulan, PMN 10T untuk HK, untuk judulnya apa pendanaan masa

operasi, artinya kan ini untuk operasional ya, Pak, ya, ini kan sebetulnya buat saya agak menjadi pertanyaan juga, PMN untuk operasional, dana operasional ini menjadi pertanyaan, walaupun ini *enggak* ada di yang Bapak paparkan, itu yang terkait dengan HK.

Kemudian yang kedua terkait dengan PLN, usulan kemarin kalau *enggak* salah kan PLN usulannya 10 T, Pak, ya, *nah* ini mendapatkan 5,86T. *Nah*, sementara saya baca di, lagi-lagi mohon maaf, Pak, ini rujukannya di media. Rasio elektrifikasi kita tahun 2022 itu *udah* 99,63 artinya untuk menuju 100%, tinggal kurang 0,37-an. *Nah*, periode yang lalu untuk mencapai hampir 2%, biayanya 10T *gitu kan*. *Nah*, ini sekarang tinggal 0,37, *masak* waktu itu *ngajuin* 10 T juga *gitu loh*, ini sekarang mendapatkan 5,86 T. Ini memang apa ya, ya menggelitik juga ini, hitung-hitungannya *gimana sih* ya, dasar perhitungannya *gimana*. Katakanlah kalau bahasa mudahnya, untuk 1% peningkatan rasio elektrifikasi itu sebetulnya dibutuhkan dana berapa? Apakah berbeda untuk daerah-daerah misalnya di Jawa, dengan daerah di *sono*, yang daerah 3T ya, di ujung-ujung itu, apakah begitu atau *gimana*? Ini tentu berangkat dari keawaman Pak, kita bertanya seperti itu.

Saya kira itu *aja*, Pak Pimpinan. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Selanjutnya kami persilakan, Bu Melani.

F- PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wamen, dan beserta jajarannya,

Saya sama, tadi menanyakan juga tentang bagaimana pengamanan untuk stok pangan nasional. Bagaimana Pak Menteri BUMN untuk mendorong dan bersinergi strategi BUMN, BUMN Pangan khususnya, untuk menghadapi Elnino? Tadi ID Food hanya untuk pembangunan *cold storage*. Dan ini bagaimana untuk mengatasi sekarang ini tentunya di dapil saya di DKI Jakarta dan tentunya di semua dapil pasti, terutama yang kurang dari stok berasnya, mau menanyakan bagaimana untuk mengoptimisasi pelaksanaan anggarannya, dan khususnya untuk menghadapi Elnino tersebut, target apa saja yang akan difokuskan?

Kemudian juga pada tanggal 13 Agustus 2023 yang lalu, Pak Menteri sempat menggelar pasar murah di Tugu Pahlawan Surabaya dengan tujuan mengantisipasi dampak dari adanya gejala harga komoditas khususnya beras. Saya ingin menanyakan, apakah nantinya ini juga merupakan strategi dari Kementerian BUMN untuk mengadakan pasar murah di lokasi-lokasi lainnya, misalnya saja di DKI Jakarta, bagaimana?

Kemudian saya ingin juga menanyakan tentang perbaikan di sektor logistik, karena Pak Menteri pernah mengatakan bahwa akan mempercepat pembangunan ekosistem logistik, yang tentunya menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi. Yang juga salah satu strateginya, telah dilakukan *holding* pelabuhan demi tujuan meningkatkan efisiensi di sektor logistik tersebut. Persoalannya, bank dunia telah merilis data *logistic performance index* 2023, di mana dalam

performance tersebut peringkat LPI Indonesia ternyata turun sebanyak 17 peringkat ke posisi 63, dari 46. Bagaimana pendapat Pak Menteri tentang adanya penurunan *logistic performance index* ini? Padahal kebijakan untuk meneruskan perbaikan sektor logistik tentunya terus dilakukan oleh Kementerian BUMN.

Dan terakhir, saya ingin menanyakan tentang telah berakhirnya KTT ASEAN 2023 dan menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan sejati dan menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan juga kemakmuran. Dengan telah berlangsungnya KTT ASEAN, apa saja bentuk kerja sama konkret yang telah dicapai oleh Kementerian BUMN, khususnya di bidang infrastruktur hijau dan transformasi digital. Kita ketahui bahwa misi ini juga sejalan dengan fokus dan prioritas dari Kementerian BUMN selama ini. Dan juga saya mendengar KTT 43 ASEAN ini telah menghasilkan manfaat ekonomis termasuk 93 proyek senilai USD38,2 miliar atau sekitar 584,46 triliun. Dengan adanya jumlah dan nilai proyek tersebut, berapa banyak proyek serta nilainya yang melibatkan BUMN-BUMN tersebut? Dan tentunya yang paling banyak dari sektor apa saja? Dan ke depannya, sejauh mana proyek yang dihasilkan oleh KTT ASEAN ini dapat juga bermanfaat secara langsung bagi masyarakat.

Mungkin itu saja, terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Pak Harris Turino.

F- PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VI.
Yang terhormat Pak Erick Menteri BUMN,
Pak Wamen I, Wamen II, dan Pak Stafsus, beserta seluruh jajarannya,

Ada enam hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama mengenai PMN. Untuk tahun 2023, sebelumnya dilaporkan bahwa ada cadangan investasi sebesar 5,7 dan dari alokasinya sudah akan disalurkan 4,51, di mana IFG mendapatkan 3T, Injourney 1,01, dan Bina Karya 500, sisanya yang 1,19 akan dialokasikan ke mana Pak? Untuk IFG, ini rasanya kebijakan yang sangat tepat, karena kita tahu bahwa terjadi kenaikan *bad debt* pada KUR di Himbara, sehingga kalau tidak diperkuat asuransinya, ini dampak sistemik-nya bisa luar biasa, apalagi besaran penyaluran semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Sebelumnya kan ada alokasi yang tadi dikatakan oleh Pak Hekal sebesar 1 triliun untuk Indonesia Re. Karena ini juga perlu sekali, Pak Erick, untuk paling tidak, memperkuat modalnya sehingga tidak terjadi, tidak terjadi impor yang luar biasa di premi Re Asuransi. Tapi ternyata dari laporan Bapak, ini digeser ke 2024. Apakah cadangan investasi sebesar 12,87 triliun ini sudah *firm* atau masih harus nego lagi, sehingga nanti akan diundur lagi?

Yang kedua, tentang kereta cepat Jakarta-Bandung. Dua hari yang lalu kita lihat direksi-direksi dari BUMN utama sudah berfoto ria di dalam kereta cepat. Kemudian kemarin kita lihat presiden bersama para artis juga sudah jalan-jalan ke sana. Pertanyaannya adalah kapan giliran Komisi VI? Dan yang lebih penting adalah kapan giliran rakyat bisa menikmati kereta cepat ini? Dalam kunjungan kerja spesifik di Bandung saat itu, Pak Direktur Utama Kereta Api, Pak Didiek, mengatakan bahwa Agustus. Sampai saya *ngomong* sama Pak Didiek, "Pak Didiek, ini saya catat", ternyata mundur lagi. Sehingga mohon konfirmasi, kapan bisa beroperasi untuk rakyat?

Dan rasanya kapan akan disambung sampai ke Surabaya? Karena kalau hanya Jakarta-Bandung yang kemudian dibanggakan 27 menit, rasanya akan jauh lebih bermanfaat kalau 3 jam menuju ke Surabaya dari Jakarta. Ini rasanya bisa menjadi satu pencapaian yang luar biasa, kalau di masa Pak Erick bisa sampai ke Surabaya, paling tidak awalnya ya, sampai ke sana.

Yang ketiga, kabar buruk sekarang, Pak, berita mengenai korupsi 1,5 triliun di tol layang MBZ, Pak. Tiga orang sudah menjadi tersangka yaitu Joko Dwi Yono yang sebelumnya adalah Dirut Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, kemudian Ketua Panitia Lelangnya dan tenaga ahli jembatan dari PT Lapi. Ini kasusnya seperti apa, Pak? Supaya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Kemudian mengenai Restru, Pak, saya menanyakan *progres* restrukturisasi untuk Rekind, *progres* restrukturisasi untuk BUMN Farma. BUMN Farma sudah ditata, tapi arahnya mau dibawa ke mana? Rasanya di tangan Pak Tiko ini akan ada perubahan, arahnya mau dibawa ke mana, apakah benar Bio Farma akan menjadi *holding* operasional atau *investment holding* atau seperti apa? Apakah Bio Farma punya kapabilitas untuk mengelola dua anak di bawahnya, dengan karakteristik bisnis yang total berbeda? Juga mengenai restru di IHC, Pak, ini mau dibawa ke mana? Kita satu kali panggil IHC untuk datang ke sini dan memberikan paparan, tetapi juga belum bisa memberikan arah, ke mana ini arahnya?

Dan terakhir untuk aspirasi dapil, Pak Tiko. Di Tegal, Pak Tiko, itu di kawasan pelabuhan Tegal itu ada pergudangan ex Bank Exim Pak. Itu sama sekali saat ini tidak dipakai dan rasanya akan bagus sekali kalau itu dijadikan kawasan kuliner khusus UKM Pak. Lokasinya bagus, tidak dipakai sama sekali, rasanya apabila Bank Mandiri turun di sana, poles-oles *dikit*, ini akan menjadi satu apa etalase yang bagus bagi warga Tegal dan rasanya kalau urusan Bank Mandiri, Pak Tiko masih tetap ahlinya.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Selanjutnya kami persilakan, ke Pak Herman Khaeron.

F- PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Erick dan seluruh jajaran yang saya hormati,

Pertama, selamat bergabung dan semoga sukses kepada Pak Roro (Pak Rosan dan Pak Robert) saya singkat Pak Roro. Iya, Pak Rosan menjadi Wakil Menteri dan Pak Robert menjadi Deputy Bidang Hukum, Pak Roro bukan Pororo, iya.

Pertama, ya saya harus memberikan apresiasi, Pak Erick mampu untuk merapikan, paling tidak itu dulu, merapikan BUMN, dengan dibuat *cluster*, kemudian memudahkan pengawasan, memudahkan laporan, dan memang ke depan PR-nya tentu masih banyak. Tapi ini adalah merupakan jalan untuk melakukan pembenahan di BUMN. Dan ya tentu sebagai mitra kerja, saya juga merasa penting untuk memberikan apresiasi kepada Pak Erick dan seluruh jajarannya.

Yang kedua, di Badan Legislasi sudah ditetapkan untuk menjadi usul inisiasi revisi Undang-Undang BUMN. Kalau kemudian banyak aspek yang ini menjadi kelemahan di dalam mengelola BUMN, sesegera mungkin pemerintah menyeriusi. Karena mungkin di masa-masa sidang yang akan datang, ini akan diputuskan di DPR RI menjadi usul inisiatif yang akan dikirim ke pemerintah. Kebetulan saya juga sebagai Badan Anggota Legislasi dan kemarin turut serta untuk memutuskan, dan banyak sekali hal-hal yang tentu ini menjadi penting. Penghapusbukuan itu juga menjadi diskusi yang sangat mendalam kemarin. Dan intinya juga menurut saya, PMN ini bisa dijadikan sebagai instrumen penyehatan. Jadi jangan juga dilepaskan dari tanggung jawab negara kepada Badan Usaha Milik Negara ini. *Nah*, oleh karenanya kemarin saya belum melihat terkait dengan diskresi keuangan atau diskresi fiskal dari negara terhadap BUMN. Ini yang mungkin nanti, Pak Tiko, coba dirumuskan kembali, masuk di situ. Karena ini *kan* sudah berapa tahun itu, dua tahun mengendap, tidak pernah dibahas dan ini adalah saat yang tepat untuk kita membuat *legacy* yang tepat sehingga BUMN ke depan betul-betul sesuai dengan harapan kita bersama.

Yang ketiga, saya juga ingin mendapatkan penjelasan ini, Pak Erick, terkait dengan *statement* di beberapa media terkait dengan pembentukan pansus Karya-Karya, BUMN Karya. Karena *kan* persoalannya itu kan dalam persoalan hutang dan saya selalu menyampaikan dalam pandangan saya di komisi, penyertaan modal negara itu jangan dibuat tabu dan tidak perlu diperdebatkan, sepanjang itu efektif untuk bisa menyehatkan BUMN. Dan pasti ada efek positifnya *gitu*, sehingga tadi mungkin *nyambung* ke yang pertama, bisa dimasukkan kepada undang-undang. Karena kalau restru, restrukturisasi, itu kan hanya memperpanjang usia saja, tidak memberikan daya ungkit yang kuat terhadap pengembangan BUMN *gitu*. Jadi mau direstrukturisasi seperti apa pun, sebetulnya hanya memperpanjang penderitaan saja. Memang ada yang bisa untuk sehat, dengan catatan, banyak catatannya, *income*-nya harus betul-betul meningkat, EBITDA-nya harus betul-betul ditingkatkan betul, kalau *enggak*, ya datar-datar ya, seperti BUMN Pangan.

Nyambung kepada BUMN Pangan, ini juga di akhir masa jabatan Pak Erick yang juga menurut saya punya cita-cita yang lebihlah daripada Menteri BUMN, *gitu* ya. Menurut saya, sesegera mungkin Pak Erick coba kita seriusi bahwa BUMN Pangan ini juga kita bisa perbaiki, karena ini hajat hidup orang banyak. Pangan ini menjadi hak asasi manusia, coba dibaca di Undang-Undang Pangan Nomor 12 Tahun Nomor 12, Nomor 18 Tahun 2012. Coba dibaca bahwa betapa mulianya siapa pun yang dapat mewujudkan terhadap kedaulatan dan kemandirian pangan. Jadi oleh karena itu, menurut saya, kalau melihat kemampuan masyarakat

secara individu yang terus menurun di bidang pangan, karena selama ini kan sangat bergantung kepada eksistensi dan keberadaan petani. Pak Erick, coba sekarang reorientasi kepada BUMN, *gitu*, kepada BUMN. Saya siap lahir batinlah membantu, Pak Erick ya, untuk masalah pangan ini agar betul-betul bisa menjadi kuat BUMN Pangan menjadi kuat, menjadi sokoguru, menjadi lokomotif, dan menjadi figur yang betul-betul bisa mewujudkan Undang-Undang Pangan tadi, sampai sekarang belum ada *gitu*. Oleh karenanya dengan berbagai instrumen yang ada saat ini di BUMN, saya meyakini Pak Erick sebetulnya bisa melampaui tahap-tahapan harapan tadi *gitu*, ya.

Jadi sekarang apalagi Pak Tiko di situ ya, di BUMN Pangan *gitu*. Pak Tiko kegigihannya kan luar biasa, berani bertempur dengan DPR kalau sudah ada hasrat dan keinginan *gitu*. Menurut saya ini yang mungkin bisa diwujudkan. Ini bisa tergambar dari kondisi PTPN hari ini. Saya juga memberikan apresiasi, begitu melihat bagaimana perkembangan dan laporan PTPN, luar biasa Pak Erick, dari yang sebelumnya rugi sudah mulai untung. Dari yang sebelumnya kegiatan usahanya *bussiness as usual*, *gitu-gitu* saja, sekarang sudah ada peningkatan. Bisnis gulanya sudah mulai meningkat, bisnis minyak gorengnya sudah mulai meningkat, artinya nampak pertumbuhannya *gitu*. Dan sejalan dengan pertumbuhan itu juga untung, dan ini juga nanti pada akhirnya bisa menguntungkan kepada negara. *Nah*, oleh karena itu menurut saya sudah kelihatan *gitu*, tinggal bagaimana memoles BUMN Pangan yang lainnya, RNI dan lain sebagainya. Dan sekali lagi bahwa instrumen penyertaan modal negara, menurut saya ini menjadi hal penting untuk itu.

Yang berikutnya, terkait dengan anak dan cucu perusahaan. Saya juga setuju lah ini dievaluasi, Pak, *gitu*. Saya dulu sering mengkritik ya *kenapa sih* BUMN kalau sudah besar kemudian membuat anak, membuat cucu, dan lain sebagainya, apa *sih* motifnya? Motifnya apakah memang supaya tidak bisa diawasi oleh DPR *gitu*? DPR itu kan mengawasi sampai kepada *holding*-nya atau pun induknya dan kemudian paling yang *related aja* yang ada korelasinya *gitu* ya. Tapi kalau sudah cucu, itu kadang-kadang sulit tersentuh *gitu*. Seolah-olah itu menjadi wilayah otonomnya BUMN itu *gitu*, sudah menjadi subordinasi yang tidak bisa disentuh oleh DPR dan Pemerintah, yang begini-begini tinggal ditertibkan ke depan. Dan saya kira Undang-Undang BUMN, kemarin kita juga membahas utuh, terkait juga bagaimana kita bisa menyentuh terhadap anak dan cucu perusahaan. Dan bahkan dalam perdebatan-perdebatan di grup, WA grup, saya juga ya bukan membela sebetulnya, karena ini rasional, realistis, *gitu*. Kalau Pak Erick sekarang banyak membubarkan anak perusahaan, cucu perusahaan, ya buat apalagi kalau kemudian ini tidak memberikan manfaat kepada induk dan kepada negara *gitu*. *Nah* oleh karenanya menurut saya ini harus dihilangkan.

BUMN juga bisa menjadi institusi yang tanggap terhadap kedaruratan dan kebencanaan, Pak Erick. Jadi mohon mungkin nanti di dalam Undang-Undang BUMN dalam revisinya terhadap kebencanaan dan kedaruratan itu juga dimasukkan, Pak, sehingga ada payung hukum, setiap BUMN memiliki kewajiban bukan hanya kewajiban CSR *gitu* ya, tetapi mungkin ada kewajiban tanggap kedaruratan dan kebencanaan. Sehingga selama ini yang dilakukan oleh BUMN pada setiap terjadinya bencana, kemudian pada setiap krisis, selalu paling depan, terdepan, saya kira nanti bisa dinaungi oleh undang-undang.

Yang terakhir, yang terakhir, terkait dengan kereta cepat. Betul tadi pertanyaannya, kapan sebetulnya ini akan dioperasikan? Saya sempat agak keras-kerasan dengan Pak Tiko waktu itu, terkait kereta cepat, tapi *udah* salaman, Pak Tiko ya. Waktu itu akan beroperasi dibulan di tanggal 1 Juni kalau *enggak* salah, awalnya, awal, awal sekali 1 Juni, kemudian tanggal 17 Agustus di hari kemerdekaan. Mundur lagi kemungkinan tanggal 20, tanggal 30, kemudian kapan

sebetulnya ini akan *running* menjadi betul-betul beroperasi semana mestinya bisnis di perkeretapiannya. Dan kalau pun terjadi kemunduran, kemudian *cost overrun*-nya nambah, belum lagi kami bisa mendengar, sampai saat ini belum ada kabar lagi berapa tahun sebetulnya ini bisa dikembalikan investasi ini. Tapi sesinya mungkin tidak ini, kalau kemudian mengganggu terhadap persiapan, saya mohon secara tertulis saja jawabannya.

Saya kira demikian.

Terima kasih, Pak Bimo sahabat saya, dan mudah-mudahan kerja sama ke depan lebih baik, Pak Bimo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Arahnya memang demikian, kemungkinan persahabatan Pak Herman Khaeron dan Pak Ario Bimo akan berlanjut.

Kami persilakan, Pak Nasim.

F- PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Iya terima kasih, Mas Bimo.

Pimpinan Komisi VI dan rekan-rekan Anggota Komisi VI yang kami banggakan, Pak Erick, Pak Wamen, dan semua deputi yang hadir yang kami harapkan menjadi kebanggaan,

Saya simpel saja, yang pertama yang Perhutani Pak Erick, mohon diingatkan lagi, khususnya dalam proyek Probowangi, itu banyak masalah untuk akses jalan, padahal ya satu kamar beda pintu saja ini sebetulnya. Jadi Karya itu banyak kesulitan koordinasinya dengan Perhutani untuk akses jalannya Probowangi (Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi). *Nah*, itu saya dengar banyak permasalahan *gitu loh* untuk izinnya, padahal kontrak dan lain-lain untuk lahan sudah selesai dengan Perhutani. Cuma mereka, Karya, kan banyak bawa alat berat atau apa itu, kesulitan katanya, *enggak* dikasih *hubungan*, itu yang pertama.

Saya lupa saya ucapkan juga selamat dulu *nih* buat Pak Erick, Rancangan Undang-Undang BUMN sudah berhasil dilegislati. *Insyallah* ini ibadahnya Pak Erick ini, yang menikmati bukan belum tentu Pak Erick, karena yang menikmati nanti Menteri BUMN berikutnya, ya bisa Pak Bimo, bisa Pak Hekal, atau Pak Ever ya kan, atau Pak Andre, *nah*, kita *enggak* tahu ini, yang pasti semoga perbaikan BUMN, Aamiin ya Allah Ya Karim, Aamiin. Semoga perbaikan BUMN ke depan itu yang terbaik, itu saya lupa tadi, semoga secepatnya disidangkan di paripurna. Ya tapi jangan sampai menggantung orang setahun itu *enggak* bagus juga, komitmenlah yang penting, kayak Pak Erick ini komitmen, deviden naik semuanya, itu yang kita butuhkan sebetulnya nanti ke depan. Di situlah kita berharapnya nanti BUMN ke depan, yang menikmati bisa Pak Faisol Riza nanti menterinya, belum tentu Pak Erick *kan, kan, kan* itu yang pertama.

Yang kedua, Pak, menjadi catatan mungkin, Pak, minta tolong, Nindya Karya kan sekarang sudah mulai hidup lagi nih, yang Bondowoso minta tolong itu kan kasihan UMKM kita, banyak yang *enggak* dibayar, Pak. Saya dengar miliaran itu di Bondowoso *enggak* dibayar,

karena Nindya Karya menganggap dirinya sudah bangkrut katanya, untuk itu *bye-bye*, ah itu minta tolong diperhatikan.

Yang ketiga, untuk pupuk, memang kalau pupuk, kalau bicara pupuk *enggak* selesai-selesai Pak. Karena semuanya dari hulu ke hilir, dari sistemnya, distribusinya, penerimanya, semua memang tidak layak. Karena saya tahu sendiri karena mayoritas hampir 60% daerah pemilihan saya itu Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Pak. *Kayak* di Banyuwangi *aja* sekarang gara-gara Peraturan Menteri apa, Pertanian *aja*, mendapatkan subsidi *aja* di Banyuwangi sudah mati Pak, semua perkebunan, Pak. Karena sudah tidak ada subsidi, ya kan, hanya pertanian beberapa sembilan bahan pokok yang mendapatkan, itu sudah mati di Banyuwangi, Pak, karena di sana banyak perkebunan di Banyuwangi. Di Situbondo juga ada, ada tebu yang dulu di Situbondo menjadi kota tebu, Pak, ada enam pabrik gula dulu, Pak Erick, sekarang hanya tinggal dua yang aktif, ya *kan*, PTPN XI yaitu pabrik gula Asembagus dan Panji, terbaik di Indonesia sebetulnya ya *kan*. Dan Jatiroto Jember ya. *Nah*, itu juga dapat PMN sampai sekarang belum beres PMN-nya, yang rencana 6 ribu TCD, 3 ribu *aja engap-engapan* sampai sekarang yang Asembagus, *nah* itu perlu dicek. Untuk pupuk itu sistem distribusinya, lalu banyak orang juga sekarang sudah pindah lahan, Pak, ya karena kesulitan pupuk itu, akhirnya dijual, kasihan, masyarakat itu ya, yang menguasai yang *gede-gede* *aja*, sawah-sawah yang *gede gitu*.

Jadi yang ketiga, aset, Pak, kembali kepada PTPN tadi, ada PTPN XII, ada PTPN XI. Di daerah saya itu di Situbondo ada PG Demas, ada pabrik kapas, sampai sekarang jadi *hoka-hoka udah*, Pak, tidak dimanfaatkan, sayang betul lahan itu. Sebetulnya disewakannya *aja* sulit *juga*. *Nah*, ini yang harus perlu diperhatikan aset-aset BUMN yang mangkrak berpuluh-puluh tahun, *nah*, itu yang sangat sayang sekali. Banyak yang mau mengelola itu sebetulnya, Pak, tapi kesulitan memang melalui direksi melalui apa itu kesulitan, itu perlu dijadi catatan.

Yang berikutnya, kasihan Pelni juga Pak, karena daerah saya juga *kan* ada pelabuhan. Pelni itu sudah *enggak* layak sudah, Pak, kapalnya atau apa, saya setuju dengan PMN untuk Pelni ini ya, kalau yang lain saya berfikir *kayak* PLN dan lain-lain ya, ya *kan*. Itu yang kami harapkan, juga Pos Indonesia, sayang, hidup tak mau, mati enggan di daerah, terjadi di Banyuwangi kemarin, Pos Indonesia untuk bantuan sosial nilainya berkurang, itu di Banyuwangi bisa dicek, Pak Erick, nanti. Pos Indonesia juga perlu ke depan didukung, di *maksimalitaskan*, ya *kan*, itu yang kita harapkan kita, Pos Indonesia.

Data UMKM, itu banyak yang *double-double*, BUMN sendiri kita punya UMKM, koperasi punya data tunggal UMKM, selalu, belum lagi kementerian yang lain. Jadi yang dapat ya itu-itulah saja, Pak. *Nah*, ini yang perlu ada koordinasinya ke depan di antara menteri ini, apa data tunggal atau statistik atau *gimana*, ini yang perlu, Pak, nanti ke depan. Itu saya harapkan, juga kalau distribusi ya sama, Pertamina, Pupuk Indonesia tentang distribusi semua sama, karena tidak tepat sasaran, sistemnya itu yang belum berjalan masih. Itu yang kami harapkan, Pak, jadi *maintenance* juga, Pak, untuk Telkom, catatan ini, Pak, Telkom, PLN untuk *maintenance*. Coba Pak Erick jalan ke daerah, *endak* usah jauh-jauh, di Jakarta saja Pecenongan, Pusat, Selatan itu kabel Pak berapa kali kebakaran gara-gara karena *maintenance*, karena saluran, karena jaringan, karena kabel, itu sampai di bawah sampai mobil pendek pun bisa nabrak, Pak, *maintenance* ini perlu penting, Pak. Ya *enggak* mungkin langsung mau di bawah tanah tapi paling tidak dibenahi, diikat atau *gimana* sampai hari ini *maintenance* PLN, Telkom itu sama sekali belum dilakukan dengan maksimal.

Saya kira itu, Pimpinan. Terima kasih.

*Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Selanjutnya, Pak Ananta Wahana.

F- PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H.):

Terima kasih.

Pak Ketua Pak Ario Bimo Pimpinan Komisi VI beserta jajaran kawan-kawan Komisi VI yang saya hormati,
Pak Erick Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajarannya,

Saya juga ingin menyoroti berkaitan dengan Perhut Perhutani, tetapi kaitannya dengan program Pak Presiden, Pak Jokowi, yang programnya ini cukup progresif pro rakyat, ini kaitan dengan perhutanan sosial, Pak. Jadi memang kaitan perhutanan sosial ini, kawasan hutan dengan pengelolaan khusus yang awalnya dikelola oleh Perhutani, sekarang ini *kan* diambil oleh negara dan diberikan kepada rakyat ya, itu hutan-hutan produksi maupun hutan lindung. *Nah*, di daerah Banten, Pak, itu ada beberapa desa yang apa, masuk dalam wilayah tersebut, misalnya di Pandeglang itu ada beberapa desa. Kemudian kalau di Lebak, Pak, itu ada Desa Mekarjaya, ada Desa Sukajadi. *Nah*, memang ini berkaitan dengan kesejahteraan petani, tentunya ini *concern*-nya PDI-Perjuangan, Pak. *Nah*, saya hanya ingin menanyakan, Pak, proses kelanjutan pemberian hak kelola ini sekarang ini sudah sejauh mana, *kan gitu* ya. Karena di Banten ini sekarang ini informasinya mandek, *kan gitu*. Terus ada yang sudah, tetapi penataannya, penataannya ini perlu keterlibatan, Pak. Karena memang *kayak* di contoh di Desa Sukajadi itu di sana justru sekarang berkembang isu pungli-pungli, *gitu*, Pak, kadang-kadang terus dikaitkan dengan oknum Perhutani ya *kan* ini, ini yang perlu kami sampaikan, ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, ini kemarin saya sudah sampaikan ke Kementerian Investasi tetapi dimensi yang lain kaitan dengan Kementerian BUMN ini, Pak. Saya bahwa di Banten ini, ini kalau kita bicara tentang investasi selalu dapat nomor lima ya *kan*, ya nomor lima. Tetapi sekaligus tingkat pengangguran terbukanya sangat tinggi, rata-rata 9% lah kira-kira di Banten itu seperti itu. *Nah*, dan ironis sekali jomplang antara selatan dan utara. Kalau kita hitung, di selatan yang terdiri dari Lebak dan Pandeglang itu jumlah industrinya *aja* hanya 53, sementara di Tangerang itu 2.800. *Nah*, ternyata bahwa kondisi semacam ini berbanding lurus, Pak, dengan IPM yang rendah di Banten itu, yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

Nah, kemarin, Pak, atau yang lalu, ketika Banten banyak mangkrak-mangkrak proyek, jadi banyak proyek-proyek mangkrak kehadiran BUMN itu bisa memperlancar, misalnya justru BUMN-BUMN Karya. *Nah*, sekarang ini keterbelakangan Banten, artinya *gap* ini terjadi kemiskinan, di mana BUMN punya aset ribuan triliun, masyarakat Banten berharap agar difokuskan gantian ke selatan, sehingga keseimbangan kesejahteraan itu bisa terwujud. Karena ironis sekali, Pak, di sana itu SDA mengenai perkebunan itu melimpah, banyak sekali, tetapi dikelolanya di Jabotabek, justru di sananya, tidak ada. Kehadiran BUMN di tempat di sana, saya pikir sangat membantu, karena juga tawaran dari pejabat gubernur yang mengatakan hilirisasi untuk mengurangi pengangguran ini barangkali akan bisa mengobati masyarakat Banten.

Kemudian yang ketiga, sama, kaitannya dengan kereta cepat, karena kemarin Pak Presiden, Pak Menteri, para artis, sudah menjajal itu dan katanya rencananya, kalau teman-teman tadi tidak menyebut, rencananya Oktober katanya, semacam itu, Oktober. Tetapi ini kemarin Pak Presiden sampaikan tidak akan ada PSO, ya *kan*, jadi artinya ini nanti kan ya tidak ada subsidi, katakanlah. *Nah*, tetapi kalau kita lihat dari targetnya, dulu, Pak Wamen tahun 2022 menyatakan kira-kira penumpangnya itu apa namanya, 61 ribu, kemudian turun menjadi 31 ribu, kemudian saya dengar menjadi 10 ribu, *kan gitu*, jadi ini turun-turun terus *kan*. *Nah*, kaitan dengan turun-turun terus itu nanti *gimana* itu nanti kira-kira, dampak terhadap apa namanya, perusahaan. Terus mohon kita mendapatkan penjelasan tentang perhitungan terbaru, karena target penumpangnya ini jauh turunnya itu *anu*, langsung merosot.

Kira-kira itu, Pak Aria Bimo, yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih, Pak Menteri.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih.

Ke Pak Nusron Wahid, terakhir Pak Demer.

F- PG (NUSRON WAHID):

Matur nuwon, Pak Bimo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Pak Faisol Riza, yang baru muncul setelah lari dari koalisi, Pak Menteri, yang hatinya baru berbunga-bunga setelah mendapatkan hadiah gol dari menantunya Pak Andre Rosiade, Pak Rosan, Pak Tiko,

Pertama-tama, saya juga sama, mengucapkan terima kasih bahwa sudah empat tahun menjadi Menteri BUMN ini, Pak Erick Thohir membawa warna lain dan membawa banyak kemajuan, membawa banyak kontribusi, baik dari aspek deviden maupun kontribusi pajak di dalam keuangan negara kita. Artinya, nilai tambah BUMN di tangan Pak Menteri Erick Thohir ini, baik nilai tambah keuangan negara dalam bentuk deviden maupun dalam bentuk pajak meningkat, kemudian nilai tambah dalam bentuk *multiplier* efek ekonomi dan sumbangan atau kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, baik pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun pertumbuhan ekonomi secara regional, baik pertumbuhan ekonomi secara agregat makro maupun secara sektoral, itu juga sudah mengalami peningkatan-peningkatan yang ada.

Namun demikian, di sisa-sisa 1 tahun atau 12 bulan ini, kurang sedikit, lebih sedikit, masih ada beberapa PR. Saya catat dari 12 *cluster* itu ada setidaknya 4 *cluster* yang memang harus *dipelototin* khusus oleh dua wamennya ini. Pertama, di tempatnya Pak Tiko, ada dua *cluster* menurut saya di situ, yang sangat tergepoh-gopoh, yaitu adalah *cluster* industri kesehatan, di mana peranan BUMN di dalam industri kesehatan itu kontribusinya kurang dari 10% dari *market share* maupun *market* kapitalisasi yang ada di dalam pasar obat maupun pasar alat-alat kesehatan yang ada di Indonesia. Lebih-lebih untuk pasar alat kesehatan. Obat mungkin

ada, lebih *mending*, tapi yang alat kesehatan sama sekali kita *tuh* neraca impornya itu sangat tinggi sekali tentang itu, karena itu menjadi PR, satu, yaitu tentang industri kesehatan.

Yang kedua, soal pangan, pangan juga sama, karena ini sektor yang sangat strategis. Pangan itu baik Bulog maupun RNI, penguasaan akan komoditi-komoditi strategis baik itu beras, gula, minyak goreng, dan sebagainya, lebih-lebih minyak goreng itu kurang dari 10% yang dikuasai oleh swasta. Beras hanya menguasai, jangkauannya Bulog menguasai 8% penguasaan akan pangan. Gula masih agak *mending*, menguasai 38% dari total produksi nasional, sehingga kita mempunyai target capaian tertentu bagaimana negara bisa hadir dalam konteks ketika terjadi krisis pangan seperti kejadian-kejadian yang pernah terjadi dua tahun yang lalu, seperti kasus minyak goreng, kalau penguasaannya hanya di bawah 10%. Sehingga kami usul, ini fokusnya adalah minyak goreng sama beras, karena ini adalah komoditi yang sangat strategis, termasuk juga daging, ini juga perlu ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang.

Kemudian di tempatnya Pak Rosan, ini masih ada beberapa BUMN yang menurut saya tidak hanya masuk angin, tapi sudah stadiumnya flu berat, bahkan flu sudah hampir mati dan belum pernah disentuh. Yang menurut saya itu juga penting di bawah jasa keuangan itu ada namanya perusahaan Perum Film Nasional, industri film. Orang itu ketika Pak Erick Thohir dijadikan Menteri BUMN, ada harapan besar, karena Pak Erick sebelum menjadi Menteri itu CEO Mahaka Group, yang pekerjaannya selalu membuat film-film juga. Tapi saya melihat pada periode ini belum ada injeksi maupun sentuhan di dalam industri film nasional, yang kantornya di Cawang, di depan Wisma Rini ini tempat saya dulu tinggal, di Cawang itu dan ada lapangan badmintonnya dulu tempat kami main badminton juga. Sampai hari ini, sejak saya kuliah sampai sekarang, tidak mengalami perubahan apa pun dan industrinya juga makin hari makin menurun. Kecuali kalau memang ini mau dibubarkan, kemudian penanganan masalah film ini mau di BLU-kan saja menjadi satu entitas BLU di bawah Kemendikbud misalnya, tapi harus ada solusi, ada keputusan, jangan sampai kemudian ini dibiarkan, ini.

Kemudian yang sektor logistik, yaitu masalah Damri dan Peruri, dan Pelni juga, ini tempatnya Pak Rosan yang. Kalau yang lain, Pak, seperti sektor perbankan, telekomunikasi, pariwisata, saya harus mengatakan, angkat topi sama Pak Menteri BUMN ini. Saya orangnya *fair*, Pak, kalau memang *oke, oke*, angkat topi. Tiga jenis *cluster* ini tanpa subsidi, tanpa proteksi dari negara sudah bisa kompetisi dan menguasai *market* di Indonesia menjadi *market leader* di Indonesia. Telekomunikasi tidak ada subsidi, tapi mampu menjadi *market leader*. Bank Perbankan apalagi, tidak ada subsidi sama sekali, tapi mampu menjadi *market leader* di Indonesia. Termasuk sektor-sektor pendukung pariwisata dan sektor logistik, pelabuhan, kereta api, dan sebagainya. Di tengah-tengah, kereta api masih monopoli lah mungkin, tapi pelabuhan di tengah-tengah pelabuhan swasta sudah boleh bergerak, masih bisa menjadi *market leader*, saya kira ini perlu kita apresiasi.

Namun demikian, Pak Menteri, sayangnya prestasi-prestasi Pak Menteri ini dikhianati oleh beberapa direksi BUMN yang keluar dari semangat *khittah* yaitu semangat akhlak. Salah satunya saya sebut nama di sini, temannya Pak Tiko, namanya Saudara Yadi, Dirut PT Dana Reksa, yang katanya bilang itu profesional. Dia ini tugasnya sejak di PPA adalah harusnya merestrukturisasi BUMN-BUMN yang bermasalah. Apa prestasinya setelah di PPA? Apa ada berhasil restrukturisasi? Tapi *kenapa* justru manusia semacam ini diangkat menjadi *holding*? Sudah *enggak* ada prestasinya. Sudah *kayak gitu*, tagihan-tagihan jasa hukum dan sebagainya di situ tidak dibayar bertahun-tahun, bahkan ketika ditagih, alasannya, pekerjaan tidak *perform*. Padahal kalau itu tidak *perform*, kenapa *enggak* disampaikan ketika itu pekerjaan dilaksanakan, ketika baru proses penagihan.

Orang-orang semacam ini yang menurut saya merusak wibawa dan catatan-catatan bagus Pak Erick Thohir itu. Dan saya minta model-model semacam ini, ya *kan*, harus dievaluasi, harus dievaluasi, yang model-model semacam ini. Meskipun dia satu almamater sama saya, sama-sama Iluni UI, sama-sama Fakultas Hukum, meskipun saya hukum *enggak* lulus, ya *kan*, tetapi ya *kan*, model-model, bukan masalah belum dibayarnya *attitude* Pak. Kalau memang dia mengatakan *enggak perform*, ya sampaikan ketika awal, *enggak perform*. Kenapa baru dua tahun mengatakan pekerjaan *enggak perform*? Itu *kan* *enggak fair*. Coba kalau seandainya dia pekerjaannya mengatakan dua tahun kemudian dinyatakan oleh Pak Erick Thohir dinyatakan *enggak perform*, kalau kita hitung-hitungan *perform*, jangan-jangan dia *enggak perform* juga. Ah ini model-model semacam ini saya mohon untuk dievaluasi, karena itu akan mengganggu.

Menurut saya, saya berani bersaksi, saya duduk di DPR ini dari tahun 2004, hanya selisih satu tahun, satu periode, 2014 saya pisah haluan sama Pak Ario Bimo, ini Menteri BUMN yang paling punya integritas, paling punya komitmen, sehingga memang layak kalau Pak Andre Rosiade itu menyodor-nyodorkan dan membisik-bisikan sama Pak Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden itu layak. Meskipun Pak Sarmuji tidak berani membisikan itu karena Pak Sarmuji terikat kode etik, Pak Sarmuji, masalahnya.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Pak Demer berarti.

F- PG (NUSRON WAHID):

Pak Demer juga sama, terikat kode etik.

Nah, yang terakhir, Pak Menteri, *mumpung* ini masih ada waktu sekitar dua minggu, yang dikeluhkan teman-teman tadi ini. Memang di dalam catatan Nota Laporan Keuangan yang disampaikan pada tanggal 16 Agustus tahun 2023, soal masalah subsidi pupuk, memang belum ada perubahan, ya *kan*, memang belum ada perubahan. Kebutuhan berdasarkan IRDKK, ini supaya *capture* masalahnya enak, kebutuhan tentang IRDKK yang diinginkan oleh petani berdasarkan masukan dari bawah, itu total 14,5 juta, 14,5 juta ton. Tapi yang disubsidi oleh Pemerintah hanya 8,9 juta ton. *Nah*, persoalannya adalah sejak, pada satu sisi pemerintah ingin supaya ada ketahanan pangan, pada sisi lain ini memang tidak dipenuhi.

Yang nomor dua, yang ini menjadi PR-nya Bapak-bapak yang di depan, para pimpinan komisi itu, yang menjadi sengkabut marut ini juga, ya *kan*, teman-temannya Pak Bimo yang duduk di Ketua Komisi IV, temannya Pak Sarmuji duduk di Pimpinan Komisi IV, meskipun sekarang pindah ke Gerindra ya *kan*, kemudian temannya Pak Ketua, Faisol Riza, duduk di Pimpinan Komisi IV. Persoalannya adalah Permentan Nomor 12 Tahun 2022 itu yang itu hasil rekomendasi Panja DPR Komisi IV, itu juga harus direvisi. Apa itu isinya? Yang berhak disubsidi hanya sembilan komoditi. Harusnya ditambahi satu catatan, sepuluh, yang membuat *enggak* repot, "Dan komoditi-komoditi lain yang dibutuhkan di suatu daerah yang itu ditetapkan berdasarkan usulan bupati atau walikota setempat". Ini dikunci hanya sembilan ini, sehingga apa? singkong *enggak* dapat, tembakau *enggak* dapat, padahal di daerah-daerah pegunungan itu singkong membutuhkan, tembakau membutuhkan, dan sebagainya hanya dikunci di sembilan itu.

Jadi ini kalau kita ingin memberes masalah pupuk, *kenapa* ini terjadi? Karena saya sayang sama Pak Erick Thohir. Pelaksana subsidi pupuk itu tunggal, Pupuk Indonesia. Sehingga

kalau di lapangan terjadi masalah, rakyat tidak tahu bahwa ini kebijakannya Menteri Pertanian, rakyat tahunya ini adalah capnya Pupuk Indonesia, ya *kan*, BUMN, Menteri BUMN-nya adalah Erick Thohir. Itu yang harus kita kawal, jangan sampai mengganggu *problem* usulannya Pak Andre Rosiade nanti ini, supaya bening terus. Karena itu ini harus dilakukan, ada dua jalur. Kalau Pak Faisol Riza *enggak* mau *enggak* ada masalah, karena memang *udah* keluar dari horizon sana, tapi minimal Pak Sarmuji sama Pak ini, Pak rambut putih ini, Pak Ario Bimo, harus sama-sama kerja cerdas ya.

Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih sama Pak Erick Thohir, hasil rapat kita hari Kamis di sini, soal PMK KUR, kita suarakan. Saya yakin Pak Tiko langsung bergerak, Pak Rosan langsung bergerak, hari Seninnya sore jam 17.15 sudah *diteken* oleh Menteri Keuangan ya *kan*, PMK tentang KUR implementasi KUR, pembayaran subsidi KUR yang selama delapan bulan *nggantung*, Himbara setengah-setengah mau ini, langsung disuarakan. Sehingga ini menandakan bahwa apa yang kita omongkan kepada Pak Erick Thohir itu, itu adalah efektif, apalagi kalau kemudian dimuat Detik oleh Pak Andre Rosiade itu, lebih efektif lagi.

Terima kasih, ya *kan*, sekali lagi ya *kan*, memang Pak Erick ini eksekutor ulung, lincah, sehingga cocok kalau seandainya diusulkan oleh Pak Andre Rosiade, yang mendampingi capresnya Pak Andre Rosiade dan capresnya saya ini, karena tapi saya tetap dukung Pak Airlangga Hartanto, Pak Andre Rosiade, *gitu*, Pak Andre, *gitu* Pak Andre ya.

WAKIL KETUA (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kode etik, kode etik.

F- PG (NUSRON WAHID):

Kode etik, Pak Andre.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sadar forumnya terlambat.

Silakan, Pak Demer mau mendukung kembali Pak Erick Thohir *enggak*? Silakan.

F- PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi VI DPR RI,
Pak Menteri dan Pak Wamen berdua yang saya hormati beserta jajarannya,

Pertama, saya sebenarnya kalau lagi rapat anggaran *enggak* mau rapat dan lain-lain, biar cepat selesainya *gitu*. Dan lain-lainnya *kan* banyak, ada pengawasan dan lain sebagainya. Tapi karena ini kelihatannya rakernya akan raker terakhir, makanya saya coba untuk bicara, *gitu*. *Kok* sebelum cuti? Sebentar lagi pendaftaran, Ndre, September ini pendaftaran otomatis begitu, pendaftaran, cuti, setelah itu mengundurkan diri, *kan* begitu. Jadi di sini harus banyak *ngomong* sekarang ini, karena kelihatannya forum untuk ketemunya lagi dalam forum resmi agak sulit kelihatannya dengan Pak Erick Thohir ini nantinya. Yang *enggak* resmi boleh, ya?

Kita kembali *flashback* masalah berdirinya daripada BUMN ini kan tentu adalah untuk *agent of development*. Seperti dari awal yang kita bicarakan, bagaimana kita menumbuhkan perekonomian kita, yang ujungnya adalah menyejahterakan, menumbuhkan perekonomian kita, kemudian kita mendapatkan pajak, kemudian juga masyarakat sejahtera, *kan* itu sebenarnya hakikat daripada berdirinya BUMN kita di negara demokrasi. Berbeda mungkin kalau sosialis itu berbeda lagi itu ya.

Jadi kalau saya melihat dengan kita mengomentari PMN, yang tadi dikaitkan dengan deviden, saya masih kurang setuju kalau PMN dikaitkan dengan deviden, karena ini kan penugasan, penugasan untuk *agent of development*. Ya kalau penugasan, biasanya itu ya banyak yang *disupport* oleh PMN, bahkan seharusnya PMN itu jauh lebih tinggi daripada deviden, *gitu*, baru kita bisa menggenjot pertumbuhan yang lebih baik *gitu*. Semakin banyak PMN-nya semakin bisa kita genjot pertumbuhan ekonomi itu lebih baik.

Tentu ini juga sangat apresiasi saya kepada Pak Menteri, karena kalau kita melihat penugasan tentang *agent of development*, tentu harus ada pelaku-pelaku baru yang timbul. Dan inilah yang dilakukan oleh, dan sebelum-sebelumnya saya hampir 15 tahunan juga bicara tentang bagaimana memberikan ruang kepada swasta ya, jangan terlalu melebar ke yang namanya BUMN kita, dan saya serius bicara bahwa ketika tidak bisa dilakukan oleh swasta, baru peran BUMN itu hadir. Namun ya pada akhirnya hanya Pak Erick yang bisa mengeksekusi ini dan saya lihat, untuk mengeksekusi ini juga sangat berat ya, meng-*squeeze* BUMN-BUMN kita sehingga tidak menjadi konglomerasi tersendiri ini sangat berat saya yakin, karena menghilangkan berapa direksi, berapa komisaris, *enggak* kehitung. Ya mungkin di daerah PTPN *aja* hilang direksi dan komisarisnya mungkin ada 100 kali untuk meng-*squeeze* itu, *gitu*. Dan itu di belakangnya ada macan, itu Pak Menteri ya, ada naga, *gitu* ya, ada gajah *gitu*, Pak, ularnya juga banyak, *gitu*, Pak. Ya saya yakin itu semuanya mengaum *gitu*, ada yang mengaum, ada yang mendesis ke Pak Erick dan itu menyebabkan saya sangat apresiasi tinggi, Pak Menteri bisa meng-*squeeze* daripada BUMN kita yang akhirnya nantinya pasti akan menumbuhkembangkan pelaku-pelaku baru di Indonesia.

Swasta akan tumbuh seperti perjuangannya Pak Rosan waktu di Kadin itu, yang kecil-kecil jangan *dong*, BUMN *gitu*, *nah* yang besar-besarnya. Mudah-mudahan sekarang ini kan Pak Rosan membawahi Karya-Karya, saya harap juga perjuangan di Kadin itu terus dilakukan, jangan *ngambil* yang kecil-kecil itu. Kalau kita nanti jadi negara sosialis kita, kalau sosialis ya harus banyak disubsidi yang lain-lain, makanan apa semua, harus disubsidi *gitu*. Tapi kan kita *enggak* mau ke arah itu, tapi kita mau masyarakatnya sejahtera berdasarkan paham yang kita anut adalah demokrasi.

Sinergi BUMN juga mungkin, kadang kala sinergi BUMN ini sangat bagus, tapi kadang kala juga sangat menghilangkan GCG, Pak Menteri. Kalau untuk percepatan dan sebagainya, *oke*. Tapi kalau untuk menghilangkan untuk bersaing dengan swasta ini, saya justru *enggak* setuju ini tentang sinergi ini, sehingga pemilahan terhadap sinergi ini, pengertian terhadap sinergi ini antar BUMN ini juga menjadi bagian terpenting untuk disosialisasi oleh Pak Menteri tentang sinergi ini dibutuhkan atau tidak, sinergi ini mengganggu pertumbuhan daripada swasta atau tidak, *nah*, ini mesti di ini ya. Atau, apa, GCG-nya harus terjaga, Pak Menteri, untuk apa sinergi BUMN ini.

Hal yang lain yang ingin saya sampaikan adalah, tadi saya udah sampaikan ke Pak Tiko tentang BUMD Aceh yang minta untuk dapat masuk ke apa, Pupuk Iskandar Muda itu, ini

kepentingan daerah juga mesti diperhatikan, sehingga mereka juga berkembang, BUMD kita di daerah.

Waskita mungkin ya, Waskita ada beberapa *project*-nya yang dalam sedang konstruksi. Dengan keterpurukannya Waskita sekarang, yang mana kita tahu hutangnya terlalu dalam itu, *nah*, terus ada yang sedang *on going* proses konstruksi. *Nah*, bagaimana memilahnya ini sehingga, apalagi ada Pak Robert, ini *udah* ada bidang apa, Deputi Hukumnya *gitu*, bagaimana memilahnya ini sehingga *project* itu tidak *mangkrak*, bisa diteruskan konstruksinya dan setelah itu bisa dinikmati oleh masyarakat, PR khusus tadi untuk Pak Rosan ini, Waskita ini. Walaupun secara perusahaan, Waskita mungkin sedang sangat berat untuk posisi tersebut.

Ya sebelum, ini saya titip *aja* ke Pak Erick, sehingga nanti mudah-mudahan nanti kalau terjadi, memang ini *kan* kita masih *enggak* tahu ini arah politik kita sampai ke mana itu. Kalau terjadinya Wapres itu, saya titip salah satunya di Bali ini, ini biar diingat nanti pas ketemu, biar jelas, jadi kalau itu jadi, kita tagih ini. Di Bali ini sekarang ini kemarin ini saya sangat lucu sebenarnya tol Gili Manuk, Denpasar yang disetujui. Padahal ada rancangan sebelumnya itu dari ke atas dulu, tolnya itu dari Gili Manuk ke Seririt, Seririt baru turun ke Tabanan, baru memecah namanya, satu, memecah daripada kemacetan, yang kedua, membuat pertumbuhan ini merata. Tapi kalau di sini *aja*, malah yang saya khawatirkan ini yang tadinya ada UMKM dan sebagainya sepanjang jalan ini, ini akan mati, di daerah Jembrana itu. Ini kurang menarik untuk saya, makanya saya minta nanti mungkin, tidak membangun tol hanya di daerah Sumatera *aja gitu* ya, walaupun ini tidak terjadi, mungkin skala ekonominya tidak terjadi, tapi saya minta ini kepentingannya adalah pemerataan sehingga tidak terjadi *gini ratio* yang cukup tinggi di Bali. Kekhawatiran saya *gini ratio* di Bali ini sangat tinggi karena pembangunan terus di selatan terus itu, dan kalau *gini ratio* yang sangat tinggi ini biasanya itu adat dan budaya juga akan ikut hilang, *gitu*.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Mohon dipersingkat, Pak.

F- PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Oleh karena itu saya minta ini diperhatikan tentang tol Gili Manuk-Seririt, terus ke bawahnya, ke Soka tersebut.

Itu barangkali, mudah-mudahan apa yang menjadi masukan-masukan sekarang ini dan apa yang menjadi kaidah-kaidah atau norma-norma atau tugas-tugas untuk *agent of development* ini benar-benar menjadi kebijakan daripada BUMN kita, sehingga pertumbuhan ekonominya benar terjadi, kesejahteraan masyarakat benar terjadi, dan kita sama-sama menikmati kesejahteraan tersebut. Untuk PMN, saya ingatkan lagi yang terakhir itu, Pak, yang barusan saya sampaikan itu, saya ingatkan lagi untuk PMN saya sangat setuju PMN itu malah bukan dikaitkan dengan deviden, PMN itu diselesaikan dengan tugas daripada BUMN yaitu *agent of development*.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Makasih, Pak Demer.

Selanjutnya meja Pimpinan, Pak Sarmuji.

WAKIL KETUA (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Bimo.

Pertama saya menyoroti tentang deviden untuk 2024, Pak Menteri. Waktu kita rapat yang lalu, proyeksi deviden itu masih 80 triliun, sama seperti tahun ini, itu pun waktu itu saya berkomentar dan memberikan *statement* supaya Pak Menteri menghitung ulang deviden 80 triliun untuk 2024. Karena ada beberapa kemungkinan, laba BUMN itu menurun dan beberapa BUMN penghasil laba di tahun 2022, di 2023 ini labanya sudah kelihatan menurun, seperti Pupuk Indonesia, karena harga internasional turun dan banyak BUMN di sektor komoditas juga labanya kelihatan akan turun. Karena itu saya cukup heran, Pak Menteri, mungkin Pak Menteri terlalu baik ini, menyetujui deviden 80 triliun untuk 2024 yang artinya naik 5 triliun.

Saya kembali, kalau Pak Menteri tidak berkeberatan, saya justru keberatan, Pak Menteri, sebenarnya, deviden 85 triliun itu berkeberatan. Di saat ekonomi dunia tidak baik-baik saja dan ada kemungkinan BUMN terutama di sektor komoditas labanya turun tetapi deviden dinaikkan sampai 5 triliun, ini memberatkan BUMN, menurut saya. Dan saya khawatir, nanti BUMN kita kalau pun ada laba, tidak berhasil melakukan ekspansi. Kalau mau BUMN-nya baik *kan* bisa terus dinikmati susunnya, harusnya, dia harus ter, harus diberi kesempatan untuk berkembang. Saya khawatir kesempatan untuk berkembang itu di 2024 hilang karena harus setor deviden lebih besar lagi, artinya laba untuk melakukan ekspansi usaha itu nyaris menjadi sangat berkurang. Paling Pak Menteri *kan* nanti *kan* mengandalkan BUMN-BUMN tradisional penyumbang deviden seperti perbankan dan sebagainya, sementara mereka pasti juga butuh uang untuk juga bisa mengembangkan usahanya, itu yang pertama. Jadi mohon itu dikalkulasi ulang, Pak Menteri.

Yang kedua, tentang *food estate*. Dalam pandangan saya, *food estate* ini strategis, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Presiden, tetapi harus jelas ukurannya. Kalau dilaksanakan oleh satu kementerian, menurut saya, itu susah untuk melakukan pertanggungjawaban secara bisnis dan memang tujuannya bukan untuk bisnis. Tapi kalau ini bisa dilakukan oleh BUMN, diambil alih oleh BUMN nanti ukurannya, takarannya, itu bisa lebih kita kalkulasi, Pak Menteri. Jadi *kan* kita punya BUMN di sektor pangan, *kenapa* tidak *food estate* yang itu merupakan proyek jangka menengah, jangka panjang, *kenapa* tidak diambil alih *aja* oleh BUMN supaya lebih terukur, supaya lebih mudah kita berdiskusi, kita pertanggungjawabkan, rencananya juga lebih jelas, kalau *ngasih* PMN nanti juga hitungannya juga bisa kita bisa ngomong *leverage*, kita bisa ngomong kapitalisasi, dan sebagainya. Saya usul, *food estate* itu ditangani oleh BUMN, barangkali itu, Pak Menteri, minta dipikirkan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ada tambahan pendalaman dari Pak Ketua.

Kami persilakan.

WAKIL KETUA (FAISOL RIZA, S.S./KETUA KOMISI VI DPR RI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang Pak Bimo, Pak Sarmuji, dan seluruh Anggota,
Pak Menteri, Pak Wamen,

Beberapa waktu yang lalu, Pak Menteri melontarkan satu wacana tentang pansus BUMN bermasalah, BUMN Karya yang bermasalah. *Enggak*, itu di beberapa berita itu ada pansus, saya hanya ingin meluruskan, Pak Menteri, biar ada korelasinya dengan tugas-tugas yang kita laksanakan di Komisi VI ini memang sebaiknya kita bahas di panja. Dan mungkin bukan hanya Karya yang bermasalah, karena ada cukup banyak juga kontraktor maupun sub kontraktor di beberapa BUMN yang lain, yang sampai hari ini juga memiliki masalah penagihan kepada BUMN, sebaiknya tidak dibatasi di BUMN Karya.

Ini saja, Pak Menteri, supaya kita juga sampaikan bahwa kemungkinan kita juga akan membentuk Panja BUMN yang bermasalah soal penagihan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih kepada Pimpinan.

Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian Anggota Komisi VI,

Selanjutnya kami persilakan pada Pak Menteri BUMN untuk memberikan respons atas tanggapan atau pertanyaan dari kawan-kawan Anggota Komisi VI, waktu kami persilakan.

MENTERI BUMN RI (DR. H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Izin Pimpinan, saya coba menjawab beberapa poin dan mungkin selebihnya kita akan jawab tertulis.

Tentu kita sepakat, bahwa pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh Indonesia jangan sampai juga meningkatkan disparitas daripada tentu penduduk yang mampu dan tidak mampu. Saya rasa sebuah komitmen besar kita harus menjaga pemerataan itu. Dan konteks-konteksnya kalau kita perbandingkan di banyak negara juga, dengan sistem ekonomi yang berbeda, bukan salah dan benar, tetapi juga kita harus memilih juga sistem ekonomi kita sendiri yang di mana kita sudah merasakan ketika terjadi Covid, kita punya efektivitas yang lebih baik kita ketika mengambil *policy* keberpihakan kepada yang lebih banyak. *Nah*, di situlah, kalau tadi disampaikan mengenai komitmen kami BUMN, untuk terus menjaga UMKM, saya terima kasih dorongan waktu itu Komisi VI. Waktu itu saya ada kesempatan bicara di ASEAN *Summit* dengan Pak Menko dan Bu Menkeu. Saya sekedar mengingatkan, karena ini sudah terlambat enam bulan, mohon didorong dan *alhamdulillah* beliau-beliau memang punya komitmen yang sama, sehingga waktu itu akhirnya PMK-nya dikeluarkan, dan sehingga sekarang dari Himbara sendiri sudah ada kepastian daripada bunga dan tentu *budget* yang kuota untuk KUR itu sendiri bisa berjalan, 297 triliun kemarin keputusannya.

Lalu memang ada permintaan juga yang kami tetap dorong mengenai subsidi bunga untuk ultra mikro, yang hari ini belum ada keputusan, dan saya berharap juga dengan waktu-

waktu yang masih ada, kita coba sama-sama mendorong ini, sehingga ultra mikronya pun punya kepastian, supaya kita bisa menjaga daripada pertumbuhan ekonomi mereka di bagian pertumbuhan ekonomi nasional, yang saya rasa hari ini akan baik tetap di 5%, walaupun memang ada catatan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang ada di China tentunya. Tetapi secara menyeluruh, saya rasa kita masih baik dan inflasi pun masih ditekan di 3%.

Yang kedua, tentu sama tadi, disampaikan oleh para Anggota Komisi VI baik dari Banten, dari Jawa Timur, dari Bali, dari Sumatera, bahwa memang pasti kami, BUMN, melihat juga ketika ada BUMN yang mempunyai aset di wilayah tersebut, kita terus *mensinkronisasikan* dengan tentu kebijakan yang bisa menyeluruh untuk wilayah tersebut, artinya apa? bahwa tadi saya sepakat, contoh yang di Banten ketika ada pertumbuhan di utara dan selatan, di mana ada ketimpangan, karena memang bagaimana pun Ibu Kota Jakarta juga membawa *impact* luar biasa untuk lapangan pekerjaan. Nah, tentu apa yang kita lakukan, bagaimana kalau para Anggota Dewan ingat, kita punya program Makmur yang mengisi di tengah-tengah itu. Nah, memang ini konteksnya salah satu kita menyeimbangi tidak hanya program itu, termasuk juga program PNM Mekar, yang tadi kita sudah bahas untuk ultra mikro dan UMKM.

Nah, tentu hal lebih besar lagi konektivitas daripada kebijakan yang ada di kami dengan pemerintah daerah memang harus terus disinkronkan, kalau tidak, memang ini yang menjadi kendala ketika tidak ada keputusan bersama sehingga tadi, *project-project* itu menjadi terhambat. Tetapi salah satu yang pernah juga saya lontarkan, saya rasa Komisi VI juga tidak keberatan, bagaimana juga ke depan, BUMN tidak terpusat hanya di Jakarta, tetapi kantor-kantor BUMN yang memang dulunya ada di daerah-daerah itu, harus juga dipikirkan kembali ke daerah-daerah tersebut, sehingga ada yang namanya distribusi pajak untuk pemerintah daerah tersebut. Apa itu BUMN-nya, tentu kita petakan kembali. Saya rasa dulu yang namanya Bio Farma, Telkom, semua itu ada di Jawa Barat, tetapi sekarang semua terpusat di Jakarta. Tetapi ini tentu diskusi yang bisa kita kembangkan, *mumpung* kita sendiri sedang membuat *blue print* BUMN ke depan, apakah dengan konsolidasi ini kita artikan semua BUMN terpusat, atau kita tentu sebar bagaimana sesuai dengan *historical* daripada BUMN-BUMN tersebut. Sehingga ini juga ada yang namanya kesinambungan dengan pembangunan daripada daerah tersebut sehingga juga kita bisa kontribusi kepada daerah. Karena kita sepakati tentu yang namanya pembangunan *kan* tidak bisa terpusat hanya di beberapa daerah saja, tetapi tentu dengan adanya misalnya jumlah BUMN ke depan ada 30, artinya *kan* bisa juga menjadi bagian membangun atau kontribusi pajak di 30 provinsi misalnya, atau mungkin 15, tergantung dari peta kekuatan dari BUMN tersebut.

Dan tentu kita terus komitmen menutup anak cucu BUMN yang tidak memang diperlukan, ya, jumlah 173 ini saya rasa, Pak Sesmen, kita harus *review* lagi dan para wamen, saya rasa waktunya masih ada, kalau kita bisa menutup lagi, memang anak cucu yang memang tadi yang kita sepakati, jangan justru menjadi gantolan daripada perusahaan *holding* yang sehat. Tetapi ini menjadi susu yang akhirnya tidak bisa merata yang akhirnya juga membuat tidak efisien BUMN tersebut, terlepas daripada kesehatan yang hari ini sudah terjadi, nanti saya coba *commit* di situ. Karena memang kembali keterkaitan daripada *project-project* itu, kalau terus dianakcukan akhirnya tidak efisien juga. Kalau memang diperlukan, *oke*, tetapi kalau tidak diperlukan sebaiknya memang kita terus kurangi, ya Pak Sesmen, ya, *gitu*.

Lalu tadi banyak Anggota Komisi VI dan Pimpinan juga bicara mengenai pangan. Ya memang ini yang sedang kita juga bicarakan dengan Menteri Pertanian, dengan Menteri Keuangan, seperti yang sebenarnya dulu kita alami ketika ada keterlambatan pembayaran subsidi daripada Pertamina dan PLN, sehingga ada kesepakatan tiga menteri. Nah, memang ini

juga yang menjadi catatan kami, saya sudah sampaikan ke Ibu Menkeu waktu itu, bahwa ini *emang* ada tagihan subsidi yaitu sebesar hampir 29 triliun sekarang, yang belum dibayarkan oleh pemerintah kepada PT Pupuk dan ini tentu kan kembali risikonya, *kenapa* salah satunya di RUU BUMN juga kita mengusulkan bagaimana antara keseimbangan ya, dana di BUMN ini, kembali konteksnya antara PMN dan deviden, dan juga percepatan pembayaran ini menjadi sebuah satu kesatuan. Dan kalau kita pelajari, waktu itu saya sempat ditanya di Baleg, *toh* aturan daripada tentu pembuatan *account* khusus itu tidak dilarang. Bukan berarti ini independen, sehingga seakan-akan dananya dikelola sendiri.

Nah, sama, Pak Sarmuji, mengenai deviden 85 triliun, ya kembali, kita waktu itu bicara 80 tetapi tentu ketika konteksnya harus 85, ya itulah, yang saya rasa di RUU BUMN ini kita harapkan ada keseimbangan juga, supaya kita bisa kembali, kemauan daripada saat itu kita dorong yang namanya penugasan tetapi juga keuangan pun juga harus menjadi bagian penyelesaian dari penugasan itu. *Nah*, kalau tidak, nanti ini *kayak snowball* lagi, yang tadi di argumentatiskan sehingga tadi ada pihak-pihak yang diberatkan. Kami tentu dalam posisi yang tidak bisa menolak, kami hanya bisa berupaya dan tentu kami juga menjaga *balance* daripada *cash flow* yang kita punya, yang seperti tadi disampaikan. *Nah*, saya berharap tentu ini menjadi catatan kami, Pimpinan, saya coba akan telisik ulang dengan kondisi keuangan terakhir, apakah kita bisa *deliver* angka yang tinggi tersebut.

Dan tentu saya rasa ada konteks-konteks yang lain mengenai tadi, mohon maaf, memang yang saya maksudkan waktu itu sesuai dengan pembicaraan kita di sini, yaitu mengenai panja sebenarnya. Ya di mana kita bersepakat bahwa jangan sampai pun kita tidak melayani para vendor yang sudah menagih tahunan, tetapi juga kita juga harus verifikasi dengan baik, mana vendor yang memang murni, memang sah, atau yang memang jangan sampai juga catatannya tidak bersih, artinya surat menyuratnya tidak lengkap. *Nah*, ini yang saya sendiri mengalami, datang ke kantor, saya coba layani tetapi tentu kalau kita panjakan bersama, biar ini juga menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya direksi yang hari ini, tetapi direksi yang sebelumnya. Dan itulah *kenapa* yang kita juga dalam kebijakan yang sudah saya rapatkan dengan para wamen, keterikatan yang namanya kerja direksi hari ini dan ke depan, salah satunya yang kita ikat waktu itu mengenai tantiem, bonus, tidak bisa langsung dibayar dalam satu tahun, bahkan kita minta cicil tiga tahun, kalau tidak salah.

Nah, hal-hal ini keterkaitan yang saya rasa *kenapa* justru kami sangat terbuka dan tentu dari Komisi VI sendiri ingin mendengar keluhan daripada vendor, kami juga ingin mendengar, karena ini bagian juga kita merapikan tentu BUMN-BUMN Karya, supaya kita juga bertanggung jawab sesuai tadi, kesepakatan kita pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan harus juga kita rasakan pemerataan kepada tentu seluruh bangsa kita.

Mungkin itu saja, Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bapak-Ibu dan hadirin sekalian,

F- PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Pak Bimo, 30 detik *aja*, sedikit, sedikit aja Pak Bimo ya, sini, Pak, masih setia saya di sini, 30 detik.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya Pak.

F- PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):

Interupsi sedikit.

Pak Menteri, tadi saya sedikit menyoroti apa yang disampaikan teman terdahulu, terkait dengan bagaimana menjaga karir dari seluruh pegawai BUMN ini. Pertama tentu ini harus diatur secara pasti bahwa karir ini jika tidak ada yang kemudian menyalahi etika, menyalahi atau menabrak aturan hukum, bahkan mungkin dia berurusan dengan persoalan hukum, menurut saya memang harus ada jalan keluarnya. Kalau misalkan ya wanprestasi ya dia harus di mana. Jangan sampai dia berkarir puluhan tahun, kemudian jadi direksi, kemudian tidak ada hal yang sesungguhnya untuk dia pensiun lebih awal, itu menjadi pensiun, *gitu*. Menurut saya ini banyak yang seperti ini, yang dia berkarir di BUMN tapi kemudian direksinya menjadi sebentar saja, kemudian juga tidak ada kelanjutannya. Ini menurut saya juga mungkin ke depan harus diperhatikan.

Sebetulnya juga saya ingin, Pak Bimo, suara Pak Rosanlah sedikitlah menjawab apa, *gitu* ya, kan dari tadi *kan* Pak Tiko sudah bicara, *masak* Pak Rosan *enggak* bicara di sini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, Pak Rosan.

WAMEN BUMN II (ROSAN PERKASA ROESLANI):

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Tadi saya ikut mendengarkan dan mencatat semua dan tentunya tadi saya mau menambahkan saja. Di BUMN, sesuai dengan arahan Pak Menteri juga bahwa kita selalu menjunjung tinggi kompetensi dan akhlak, karena itu adalah patokan kita dan untuk berkarir di BUMN, kita memang selalu apa, melakukan yang istilahnya tidak hanya dari segi kompetensinya saja secara berkelanjutan dan berkesinambungan, tetapi juga masalah akhlak yang sangat ditekankan, sehingga apabila dua hal itu berjalan beriringan, *Inshaallah* BUMN ini menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih positif lagi, dan mempunyai dampak dan *impact* yang sangat baik, tidak hanya untuk kita semua yang ada di sini tapi juga untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Mungkin dari saya tambahannya itu saja, tetapi dengan selalu berkomunikasi secara *intens*, baik itu dalam forum-forum formal dengan Anggota Dewan terhormat yang berada di sini, saya yakin kita semua akan menjadi lebih baik dan BUMN akan menjadi lebih bermanfaat lagi ke depannya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaiikumsalam,

Tambahan, Pak, Pak Rosan, untuk hal yang terkait dengan perbankan Himbara, info yang terkait dengan hapus tagih hapus buku mengenai KUR dengan nilai maksimum yang 500 juta dan juga informasi untuk kredit macet di bawah 5 miliar yang saat ini informasinya adalah masih menunggu keputusan atau surat dari menteri, dan kriteria yang menjadi debitur sejak tahun 2015 dan debitur itu masih bermaksud menjalankan usaha dan untuk mengembangkan usaha, ini penting di, dipastikan. Karena yang terjadi di bawah sekarang, karena informasi ini, perbankan-perbankan Himbara itu ofensif melakukan pelelangan-pelelangan. *Nah*, sebaiknya sambil menunggu peraturan menterinya, kalau penagihan saya kira masih wajar, tapi untuk pelelangan, kolateral-kolateral yang kemarin menjadi agunan, sebaiknya di *stop* dulu.

Jadi gara-gara ada wacana informasi yang terkait dengan peraturan menteri untuk hapus tagih dan hapus buku kredit macet yang 5 miliar ini, sekarang muncul pelelangan-pelelangan yang cepat, mempercepat pelelangan dan yang *endak* mau bayar *kok* masih ditagih, saya kira wajar, apakah pernah dengar ini? Belum ya? Di bawah, terjadi ini. Mohon dicermati *aja*, Pak Menteri, untuk hal yang terkait dengan informasi hapus tagih dan hapus buku untuk nilai KUR yang maksimum 500 juta. Hapus tagih ya? Iya, di Kementerian Keuangan.

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Yang menyebutkan itu kemarin Menteri Koperasi mengenai ini, dia menyampaikan bahwa akan ada penghapusan utang untuk UMKM. Hanya mesti jelas, UMKM yang berhutang berapa lama *nih*. Nanti yang baru-baru utang juga *enggak* mau bayar, kalau ada penghapusan kan itu juga mesti, mesti tegas.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Yang menjadi kreditur sejak 2015, saya kira itu mohon dicermati untuk teman-teman, karena menyangkut Bank Himbara.

Bapak-Ibu, dan Saudara-saudara sekalian,

Kami ucapkan terima kasih.

Sebelum rapat kami tutup, kami akan melanjutkan ke kesimpulan yang pertama, setelah Pak Menteri respon, merespons dari tanggapan dari pendalaman kawan-kawan Anggota Komisi. Kami persilakan, untuk kesimpulan kedua.

2. Komisi VI menerima penjelasan dari Menteri BUMN terkait alokasi Penyertaan Modal Negara tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hutama Karya sebesar Rp18.600.000.000.000,00 dalam rangka pembangunan jalan tol Trans Sumatera I dan penyelesaian tol ruas Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi,
 - b. PT Bahana Pembina Usaha Indonesia/*Indonesia Finance Group* sebesar Rp3.560.000.000.000,00 dalam rangka penyelesaian penyelamatan pemegang polis Jiwasraya,
 - c. PT Wijaya Karya sebesar Rp6 triliun dalam rangka penguatan permodalan untuk menunjang kebutuhan modal kerja proyek strategis nasional,

Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman dengan masing-masing BUMN yang menerima alokasi Penyertaan Modal Negara tersebut.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri BUMN terkait penyertaan modal negara yang berasal dari cadangan investasi tahun anggaran 2024 yang akan diprioritaskan kepada BUMN-BUMN sebagai berikut:
 - a. PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp2.000.000.000.000,00 dalam rangka pengadaan kereta,
 - b. PT Reasuransi Indonesia Utama sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dalam rangka penguatan permodalan,
 - c. PT Pelayaran Nasional Indonesia, Pelayaran Nasional Indonesia sebesar 3 triliun dalam rangka pembelian kapal penumpang angkutan perintis,
 - d. PT Industri Kereta Api sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dalam rangka peningkatan kapasitas produksi,
 - e. PT PLN Persero sebesar Rp5.860.000.000.000,00 dalam rangka pelaksanaan program elektrifikasi desa,
 - f. PT Rajawali Nusantara Indonesia/*ID Food* sebesar Rp832.000.000.000,00 dalam rangka pembangunan *cold storage* dan modal kerja,

Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman dengan masing-masing BUMN yang akan menerima alokasi penyertaan modal negara yang berasal dari cadangan investasi tahun 2024 tersebut. Komisi VI, eh, kita setuju dulu.

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk memberikan jawaban tertulis yang belum dijawab dalam forum ini dalam waktu paling lambat lima hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI tersebut.

(RAPAT: SETUJU)

Demikian kesimpulan rapat pada hari ini.

Bapak-Ibu, dan hadirin sekalian,

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, kawan-kawan Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi VI, dan juga kepada Pak Menteri beserta jajarannya.

Atas nama Pimpinan, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mengikuti rapat hingga selesai. Dengan demikian rapat kerja hari ini dapat kami tutup.

**(KETUK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.46 WIB)**

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001